

PGS.FEB 31

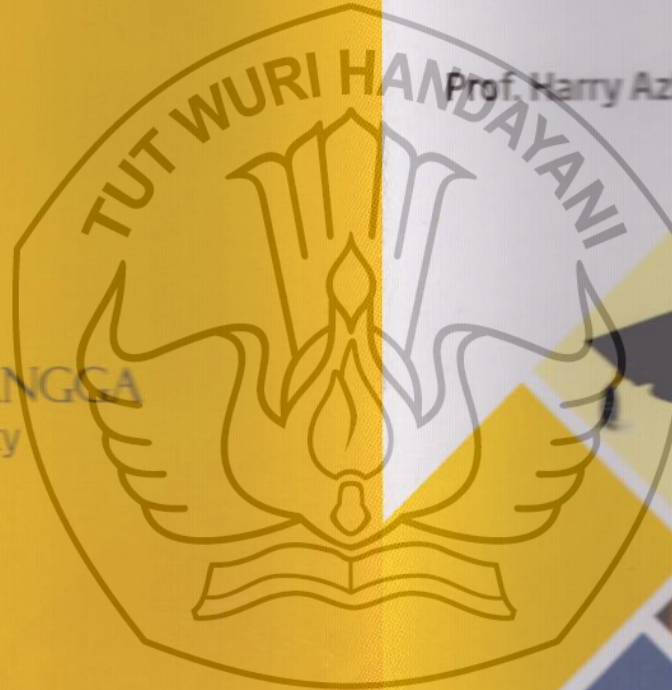
PIDATO PENGUKUHAN

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA :
UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality



Disampaikan pada
Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya
pada Hari Senin, Tanggal 26 November 2018

**PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA:
UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**



Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
di Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 November 2018

Oleh

HARRY AZHAR AZIS

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kita semua,

Yang terhormat,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga,

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Airlangga,

Sekretaris Universitas Airlangga,

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu,

Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Airlangga,

Para Direktur, Ketua Pusat, Lembaga, dan Badan di Lingkungan Universitas Airlangga,

Para kolega, rekan, sahabat, dan undangan sekalian yang saya muliakan.

PENDAHULUAN

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir di tempat yang terhormat ini. Suatu kebahagiaan tak terhitung bagi saya berdiri di sini menyampaikan pemikiran berkenaan dengan pengukuhan Guru Besar di bidang ilmu ekonomi, spesialisasi audit keuangan negara dalam Sidang Universitas Airlangga yang terhormat ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan persoalan yang menurut saya mendasar dalam kehidupan bernegara. Persoalan yang dimaksud menyangkut upaya perwujudan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan

dan/atau kemakmuran rakyat yang harusnya makin diperkuat melalui perbaikan terus-menerus pemeriksaan (audit) keuangan negara. Prosesnya sederhana dan logis jika kita terus memperbaiki simpul hubungan kerja antar lembaga negara. Terutama terkait keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; termasuk audit, keuangan negara, APBN/D, dan juga keuangan negara yang dipisahkan. Pemeriksaan dimaksud adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ujung dari pemeriksaan ini, bukan saja terciptanya governansi dalam pemerintahan, tetapi sekaligus menunjukkan apakah anggaran negara bermanfaat bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Lebih dari 73 tahun kita merdeka dan lebih 20 tahun kita hidup di era reformasi, pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harusnya makin membawa Indonesia ke pencapaian cita-cita kemerdekaan. Pembahasan saya lebih mencermati kondisi ekonomi dan politik selama era reformasi, terutama berkaitan pengelolaan keuangan negara, serta merekomendasi perbaikan masa depan negara.

Pidato saya ingin menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, apakah perjalanan kehidupan bernegara telah sesuai cita-cita Proklamasi? Kedua, apakah keuangan negara yang dikelola pemerintah dan lembaga terkait telah dilakukan sebaik-baiknya untuk pencapaian tujuan kemerdekaan? Ketiga, apakah pemeriksaan keuangan negara mendorong ke arah lebih baik pengelolaan keuangan negara untuk tujuan bernegara?

Dalam Sidang Universitas Airlangga ini, saya mengulasnya dalam pokok pikiran saja. Sebagian pokok pikiran adalah menyimpulkan dan mempertajam kembali ide para ahli akademisi ataupun praktisi. Sebagian lagi adalah refleksi perjalanan hidup saya yang berkesempatan mengabdikan di beberapa jabatan

publik, terutama di DPR RI dan BPK RI, lembaga negara yang bertanggung jawab atas perumusan, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan negara di negara ini. Sebelumnya, berkenaan saya menyampaikan kesimpulan umum. Menurut saya, perjalanan sejarah bernegara kita sudah menuju tujuan kemerdekaan, meski terkadang melambat atau berubah karena berbagai sebab. Era reformasi mendorong pembangunan ke arah yang sesuai, walau harus terus perlu dikoreksi. Sebelum reformasi, pembangunan lebih banyak kita lihat di Jawa atau di kota-kota tertentu saja; setelah reformasi yang ditopang pelaksanaan konsep otonomi daerah, pembangunan mulai terlihat di seluruh Indonesia, dengan karakteristik dan gayanya masing-masing.

Menjadikan reformasi sebagai penguatan substansi demokrasi, baik politik maupun ekonomi, adalah keniscayaan masa depan Indonesia. Substansi demokrasi adalah sistem bernegara yang menghasilkan tata pemerintahan yang baik, yang didukung mayoritas rakyat. Sepanjang didukung oleh mayoritas penduduk, pemerintahan itu memperoleh legitimasi (Smith and Lindeman, 1955). Pemerintah yang terpilih tentu harus selalu diawasi agar memenuhi janji memperbaiki nasib rakyatnya. Demokrasi, telah dipilih bangsa kita, dengan berbagai pola, sejak merdeka dan diperkuat lagi di era reformasi, sebagai sistem dan mekanisme bernegara. Penguatan ini harus bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan yang menyejahterakan rakyat. Penguatan ini adalah proses dinamis, yang musti diukur dan indikatornya harus membaik dari waktu ke waktu. Terapan teori ekonomi terutama yang berpihak pada kesejahteraan, apalagi ada *political will* pemegang kekuasaan, sesuai sistem tata negara kita, dapat berkontribusi bagi kemaslahatan rakyat.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Majelis dan hadirin yang saya muliakan,

Tugas pemerintah Indonesia, dalam pembukaan UUD NKRI 1945, adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tugas itu saling terkait dan tidak terpisahkan. Melindungi segenap bangsa bukan sekedar melindungi dari ancaman dan/atau ketakutan, tetapi juga tumbuhnya rasa nyaman dan damai dimana pun rakyat Indonesia berada, serta melindungi rakyat dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan, dan bahkan pengangguran. Memajukan kesejahteraan umum adalah mengangkat kualitas kemanusiaan rakyat, tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, karena kesejahteraan adalah indikator bangkitnya martabat kemanusiaan setiap rakyat.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah membangun karakter bangsa berpendidikan, yang beriman taqwa, visioner, inovatif, fokus, mandiri, rasional, objektif, berintegritas tinggi, dan sekaligus halus budi pekertinya serta bangga memajukan kejayaan bangsa serta menjauhi pekerjaan sia-sia. Makin cerdas dan tinggi martabat suatu bangsa, maka makin produktif kinerjanya, makin luhur sikap, dan disiplin perilaku kemasyarakatannya. Dengan karakter itu, makin aktif Indonesia dalam pergaulan dunia yang mendorong perdamaian abadi dan berpartisipasi aktif dalam menegakkan keadilan sosial. Itulah cita-cita Indonesia sebagai tanggung jawab pemerintah. Rakyatnya cerdas, sejahtera, hak-hak kemanusiaannya dilindungi, dan aktif dalam pergaulan internasional.

Isu kesejahteraan selalu menjadi latar belakang perubahan sosial di Indonesia. Negara kita dalam era tertentu dianggap telah berubah jauh dari tujuan kemerdekaan. Ketiadaan kesejahteraan sebanding dengan ketiadaan rasa keadilan di tengah masyarakat. Rakyat yang tidak sejahtera, pasti membuatnya berpikir telah terjadi ketidakadilan dalam hidup bernegara. Dimanakah para pemimpin negara? Rakyat yang tidak sejahtera adalah rakyat yang miskin seolah-olah terpojok di sudut dinding, yang tertutup *opportunity*-nya. Tidak ada jalan mundur kecuali maju melawan ketidakadilan, dengan segala cara, walau nyawa taruhannya. Itulah, seperti dikatakan Amartya Sen (*The Idea of Justice*, 2009) pemenang hadiah Nobel, bahwa ketidakadilan dan perlawanan (pemberontakan) seperti dua saudara kembar. Semakin banyak orang miskin, semakin meluas sikap pemberontakan.

Orang-orang kaya tidak dapat hidup nyaman di tengah meluasnya kemiskinan. Banyak rumah orang kaya memasang pagar tinggi agar terlindung dari orang miskin di sekitarnya. Pagar itu tidak mungkin melindungi orang kaya, tetapi rasa keadilan rakyatlah pagar kesejahteraan sesungguhnya. Banyak kejadian, seorang pencuri tertangkap di kampung miskin, mati dikeroyok, namun seolah-olah dianggap biasa-biasa saja. Hampir tidak ada rasionalitas di tengah-tengah orang miskin. Ketiadaan pekerjaan juga menjadi sebab munculnya kemiskinan. Ketidakadilan dan kemiskinan yang meluas menjadi *momok* kekhawatiran ketidaknyamanan hidup di masyarakat. Khawatir atas dampak kemiskinan, di era khalifah Umar bin Khattab RA, beliau sendiri memanggul sekarung gandum untuk seorang ibu miskin yang ditemuinya sedang memasak batu untuk menghibur anak-anaknya kelaparan. Beliau tidak mau dibantu stafnya, Aslam, dan berkata: “Apakah kamu mau menanggung dosa saya ini di hari pembalasan

kelak?” (Baquini, 2015). Kita butuh pemimpin seperti itu di semua tingkatan pemerintahan.

Konsepsi kesejahteraan di Pembukaan UUD NKRI 1945 dijabarkan lebih jelas dalam batang tubuh Konstitusi. Kesejahteraan dinyatakan sebagai hak warga negara dan pemerintah berkewajiban memenuhinya. Warga negara dijamin hak-haknya oleh konstitusi. Para pemimpin negara, yang dipilih secara demokratis, harusnya paling bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Mereka dipilih untuk atas nama negara melindungi, mencerdaskan, dan memakmurkan seluruh rakyat.

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengartikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Karena itu, konsepsi kesejahteraan (*welfare*) hampir identik dengan kemakmuran (*wealth*). Sebagian orang berpendapat, kesejahteraan adalah *basic necessity*, sementara kemakmuran adalah *luxury*. Diperlukan minimal hadirnya kesejahteraan dalam kehidupan rakyat.

Todaro (2003) berpendapat bahwa kesejahteraan mengacu pada tingkat hidup yang ditandai terentasnya kemiskinan, kesehatan lebih baik, pendidikan lebih tinggi, dan produktivitas masyarakat meningkat. Beberapa pakar lain menyatakan perspektif itu tidak cukup. Kesejahteraan terkait dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Hal-hal yang *immaterial* seperti kepuasan dan aktualisasi diri, perlu ditimbang dalam konsepsi kesejahteraan. Konsepsi kesejahteraan dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial inilah yang agaknya lebih banyak diamini para pakar sosiologi. Arthur Dunham, Harold L. Wilensky, Charles

N. Lebeaux, dan Walter A. Friendlander, masuk dalam barisan pendukung perspektif tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang konsep kesejahteraan sosial sebagai kegiatan terorganisir dengan tujuan membantu individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras kepentingan setiap individu dan masyarakat (Husna, 2014). Dalam Piagam PBB (*Charter of The United Nations*), yang ditandatangani di San Francisco tahun 1945, menegaskan kerja sama internasional untuk memecahkan masalah (kesejahteraan di bidang) ekonomi, sosial, budaya, atau karakter *humanitarian* untuk respek pada hak-hak asasi dan kebebasan asasi tanpa diskriminasi ras, gender, bahasa atau agama. Tujuan tersebut dicapai melalui metode agar individu dan komunitas dapat memenuhi kebutuhan, berkemampuan memecahkan masalah perubahan, dan bergotong royong memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Peran organisasi negara memenuhi kesejahteraan sosial dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan. Peran masyarakat melalui lembaga masyarakat, seperti LSM, panti-panti sosial dan lain lain, juga untuk mendorong pencapaian tujuan kesejahteraan sosial itu, walau mungkin lebih terbatas.

Pada awalnya, pengukuran tingkat kesejahteraan lebih pada capaian indikator agregat, kental dimensi makroekonominya. Contohnya, Pemerintah Orde Baru memakai konsep Trilogi Pembangunan, yaitu: pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas nasional yang dinamis, serta pemerataan pembangunan dengan hasil-hasilnya. Metode ini mengukur laju pertumbuhan produk domestik bruto, yang dikatakan meneteskan kesejahteraan pada rakyat miskin, yang dikenal dengan *trickle down effect* (Winarni dan Jalal, 2018). Rakyat hanya objek pembangunan. Pendekatan ini tidak menjawab kenapa masih banyak orang miskin, juga di

negara-negara maju sekalipun. Hanya, di beberapa negara maju ada konsep membantu per orang miskin yang dialokasikan ke anggaran. Sebagai contoh ada anggaran jaminan sosial (*social safety net*) dan bantuan sosial (*social assistance*) kepada individu, keluarga miskin dan kurang beruntung (*poor and disadvantaged*). Prinsipnya, negara tidak membolehkan orang miskin mati karena penyakit atau kelaparan. Di Indonesia, bila ada orang miskin mati karena penyakit atau kelaparan, semua pihak saling melempar tanggung jawab. Tidak ada lembaga negara yang jujur berani mengambil tanggung jawab. Sering ada kejadian orang miskin mati dulu di suatu daerah dan menjadi berita nasional, kemudian muncul anggaran dan pejabat yang berwenang baru memberikan bantuan kemanusiaan dengan cara yang mengharukan. Seolah dengan begitu, selesailah tugas menyantuni kemiskinan di negeri ini.

United Nations Development Programme (UNDP) berpendapat pembangunan adalah proses memperbesar pilihan manusia. Makin banyak pilihan diimbangi dengan ability memenuhi pilihan-pilihan itu, makin sejahteralah manusianya. Metode UNDP menjawab kritik perlunya indikator relevan. *Human Development Index* (HDI)-UNDP dinilai mampu menjelaskan masalah pembangunan dan kesejahteraan manusianya. Tiga kriteria menjadi basis pengukuran HDI yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*being knowledgeable*), dan standar hidup layak (*have a decent standard of living*). Konsep HDI menjelaskan tingkatan kemakmuran suatu bangsa dan penduduknya bukan dari pertumbuhan ekonomi belaka tetapi juga dari menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan dan strategi pembangunan (UNDP, 2018).

Tabel 1. *Human Development Index* dan Komponennya (2018)

Rank	Negara	HDI	Life Expectancy	Expected School	GNI per Capita
1	Norway	0,953	82,3	17,9	68,012
7	Hongkong	0,933	84,1	16,3	58,420
9	Singapore	0,932	83,2	16,2	82,503
83	Thailand	0,755	75,5	14,7	15,516
86	China	0,752	76,4	13,8	15,516
105	Uzbekistan	0,710	71,4	12,0	6,470
113	Philippines	0,699	69,2	12,6	9,154
116	Indonesia	0,694	69,4	12,8	10,864
168	Afghanistan	0,498	64,0	10,4	1,824

Catatan: UNDP 2018 Statistical Update, peringkat 1-9 termasuk kategori *very high human development*, 83-105 *high human development*, 113-116 *medium development* and 168 *low human development*

Tabel 1 di atas menjelaskan peringkat HDI dari 189 negara tahun 2018. Indeks HDI internasional diperkenalkan tahun 1990 dan terakhir dipublikasi 14 September 2018. Hongkong (HDI 0,933), Singapore (0,932), dan Jepang (0,909) termasuk yang tertinggi di Asia. Indonesia di urutan negara ke 116 dalam peringkat UNDP termasuk kategori *Medium Human Development*. Peringkat paling rendah di dunia adalah Niger dengan HDI 0,354, kategori *low human development*. Pengukuran HDI tiap tahun sekaligus menjelaskan perkembangan indikator kesejahteraan masing-masing negara di dunia.

Indonesia juga ada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks ini dikembangkan BPS mengacu konsep HDI-UNDP. Data BPS 4 April 2018 agak berbeda dengan data UNDP. Tahun 2017, IPM Indonesia di 0,708, kategori *High Human development*. Di bawah Indonesia ada Vietnam (0,694), India (0,640), Timor Leste (0,625), dan Laos (0,601). Tahun 2010, IPM Indonesia masih 0,665,

kategori *medium human development*. Di tahun 2017, IPM di provinsi bervariasi yaitu paling rendah di Papua 0,591 (*medium human development*) dan paling tinggi di DKI Jakarta 0,801 (*very high human development*). Hal ini sebanding dengan angka pengeluaran per kapita per tahun dengan pola yang sama, Rp7 juta di Papua dan Rp17,7 di DKI Jakarta.

Pada perkembangannya, perlu perbandingan pengukuran tingkat kesejahteraan dari periode ke periode. Penilaian *cross-sectional* dan *time series* memungkinkan penilaian atas capaian pembangunan manusia secara berkala. Pada pola seperti ini, dikembangkan metode pengukuran lain. Misalnya, *Gross National Happiness* mengganti perhitungan *Gross Domestic Product* di Bhutan, *Index Quality of Life* di Kanada, *The Millennium Development Goals – UN Initiative*, *Prosperity Index* di Inggris, *The Better Live Index* di Uni Eropa dan Amerika Utara.

BPS mengenalkan juga indeks kebahagiaan sebagai ukuran kesejahteraan. Di tahun 2014, diukur dimensi kepuasan hidup (*happiness*). Sejak 2017 ditambah dimensi perasaan (*affect*) dan makna hidup (*eudaimonia*). Indeks ini adalah tingkat kebahagiaan penduduk, yang tidak terkait langsung kemiskinan. Ada orang miskin merasa bahagia tetapi ada pula orang kaya belum tentu bahagia hidupnya. Daerah terbahagia adalah Maluku Utara (75,68) dan paling tidak bahagia adalah Papua (67,52). Indeks Kebahagiaan Indonesia 70,69 tahun 2017 (cukup bahagia). DKI Jakarta (71,33), Bali (72,48) dan Kepulauan Riau (73,11) sedikit diatas kebahagiaan nasional. Menurut BPS, sumber kebahagiaan dari sisi personal bagus, hubungan sosial dan keamanan bertetangga bagus, serta pendidikan, pendapatan dan rumah huni yang layak (Kumparannews, 2017). Indeks kebahagiaan dimulai tahun 2012 oleh PBB setelah konsep ini diterima Sidang Umum PBB, Juli 2011. Dalam *The World Happiness Report 2018*, negara

paling bahagia adalah Finlandia (76,32), sedangkan Indonesia (50,93) di urutan 96 dari 156 negara. Negara paling tidak bahagia, Burundi, Afrika Tengah (29,09).

Model pengukuran lain dengan pola sejenis juga dikembangkan di Indonesia. Misalnya, Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR). IKRaR adalah indeks kesejahteraan dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pengukurannya mencakup tiga dimensi ekonomi, sosial, dan politik, yang dijabarkan dengan demokrasi dan *governance*. Yang lain, IKRN (Indikator Kesejahteraan Rakyat Nasional) adalah indikator kesejahteraan disusun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden. Jumlah orang miskin *by name dan by address* pada TNP2K digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan lebih baik setelah berkoordinasi juga dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Aspek keadilan dari kesejahteraan masih bermasalah. Tabel 2 memperlihatkan Rasio Gini yang berfluktuasi. Rasio Gini menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan mulai dari 0 (*perfect equality*) sampai 1 (*perfect inequality*). Rasio Gini di tahun

Tabel 2. Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kemiskinan Relatif (% populasi)	16.58	15.4	14.15	13.3	12.49	11.66	11.47	10.96	11.13	10.70	10.12	9.82
Kemiskinan Absolut (jutaan)	37	34.9	32.5	31	30	28.5	28.5	27.7	28.5	27.7 ¹	26.5	25.9
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.376	0.368	0.367	0.37	0.388	0.413	0.4	0.41	0.4	0.39	0.391	0.389

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2018.

2014 adalah tertinggi (0,414). Tahun 2018, Rasio Gini membaik 0,389 tetapi ketimpangan di pedesaan justru meningkat dari 0,320 tahun 2017 menjadi 0,324 tahun 2018. Kenaikan Rasio Gini pedesaan karena kenaikan pendapatan golongan 20 persen teratas sebesar 4,95 persen dibandingkan pendapatan golongan 40% terbawah yang hanya naik 2,93%.

Kemiskinan cenderung terus menurun di era reformasi (Tabel 2). Tahun 2018 disebut sebagai angka kemiskinan terendah (9,82%) atau 25,95 juta orang miskin turun dari tahun 2017 yaitu 26,58 juta (10,12%). Angka kemiskinan lebih buruk di desa. Di kota jumlah penduduk miskin 10,14 juta (7,02%) sedangkan di desa masih tinggi 15,81 juta orang (13,20%). Pembangunan terasa lebih menguntungkan penduduk kota dibanding desa. Pada tahun 1990-an sekitar sepertiga penduduk tinggal di perkotaan, kini hampir separuh penduduk Indonesia berada di perkotaan (*Indonesia-Investments*). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), adalah ukuran intensitas kemiskinan yaitu semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran orang miskin dari garis kemiskinan. Di samping itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), yaitu semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan di September 2017 adalah 1,79 dan turun menjadi 1,71 di Maret 2018. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan juga turun pada periode yang sama yaitu dari 0,46 menjadi 0,44 (Kurniawan, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan tren penurunan kemiskinan di era reformasi makin hari makin baik. Perdebatan garis kemiskinan Rp401.000 per bulan versi BPS dari rerata nasional yang dianggap terlalu kecil, bila diperbesar pun, tidak mengubah tren penurunan kemiskinan itu, hanya jumlah dan % orang miskin berubah.

Tabel 3. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tahun 2016--2018

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2016	2017	2018
		Agustus	Agustus	Februari
1	Tidak/belum pernah sekolah	59,346	62,984	42,039
2	Tidak/belum tamat SD	384,069	404,435	446,812
3	SD	1,035,731	904,561	967,630
4	SLTP	1,294,483	1,274,417	1,249,761
5	SLTA Umum/SMU	1,950,626	1,910,829	1,650,636
6	SLTA Kejuruan/SMK	1,520,549	1,621,402	1,424,428
7	Akademi/Diploma	219,736	242,937	300,845
8	Universitas	567,235	618,758	789,113
Total		7,031,775	7,005,262	6,871,264

Sumber: BPS, 2018

Pengangguran juga unsur penting dalam mengukur kesejahteraan. Angka pengangguran terbuka di tahun 2018 turun menjadi 5,13% atau sebesar 6,87 juta jiwa, dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar 5,33% atau sebesar 7,01 juta. Menurut BPS di tahun 2018, ada 133,94 juta angkatan kerja tapi hanya 127,07 juta yang bekerja dengan tiga kategori, bekerja penuh 87,08 juta, bekerja paruh waktu 30,29 juta dan setengah menganggur 9,70 juta. Walau angka pengangguran menurun, jumlah penganggur terbanyak justru mereka yang berpendidikan SLTA (1.650.636), seperti terlihat di Tabel 3. Sementara yang berpredikat Diploma/Sarjana menganggur ada 1 juta lebih. Warga yang tidak pernah sekolah justru terendah angka penganggurannya.

Konsep kesejahteraan lebih intens menjadi perdebatan politik dalam pembahasan RUU APBN. Ketika saya menjadi Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, tahun 2008-2009, dan kemudian Ketua Badan Anggaran DPR RI, tahun 2009--2010, pembicaraan asumsi

makro ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi oleh Pemerintah selalu dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan. Selama saya menjadi Anggota (2004–2014) dan kemudian Pimpinan Komisi XI (2010–2014) DPR RI, dalam setiap tahun pembahasan RUU APBN, Pemerintah selalu berasumsi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia diakui lebih disebabkan aspek struktural yaitu ketiadaan lapangan kerja. Banyak orang jatuh miskin karena tidak bekerja daripada kemiskinan alamiah yaitu orang cacat, anak yatim/piatu, orang jompo ataupun janda-janda tua.

Saya tidak menolak argumen itu, tetapi saya mementingkan pemerintah lebih memperhatikan pada alokasi anggaran mana saja yang dapat mengarah langsung dan tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu harus ditunjukkan melalui penetapan angka-angka indikator kesejahteraan dalam UU APBN yang ditetapkan Pemerintah bersama DPR. Implikasinya, tiap tahun rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah diperoleh gambaran dampaknya bagi pencapaian indikator kesejahteraan. Indikator itu, yang saya sebut sebagai indikator kesejahteraan adalah berapa banyak tiap tahun: (1) berkurangnya angka kemiskinan, (2) berkurangnya tingkat pengangguran, (3) berkurangnya angka Rasio Gini, dan (4) meningkatnya Indeks IPM.

Alhamdulillah, mulai UU Nomor 10 tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 penurunan angka kemiskinan mulai disebut pada Pasal 39 UU tersebut. Penurunan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran disebut lagi pada UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 di Pasal 45. Pada UU Nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan APBN Tahun

Anggaran 2014 selain dicantumkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, juga mulai dimunculkan penurunan Rasio Gini. Dan, terakhir, pada UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015, mulai dikenalkan peningkatan IPM, selain penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan Rasio Gini. Angka-angka itu disebut sebagai target pembangunan. Dengan demikian, makin tahun makin jelas apakah APBN membuat rakyat makin sejahtera dengan melihat pencapaian indikator-indikator kesejahteraan itu.

DEMOKRASI DAN POLITIK ANGGARAN

Hadirin yang saya muliakan,

Demokrasi telah dipilih sebagai sistem pengelolaan negara Indonesia sejak kemerdekaan dan diperkuat di era reformasi. Di negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jimly Asshiddiqie (2005) mengatakan, kekuasaan pemerintahan negara di tangan rakyat mengandung tiga arti: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Penegasan ini juga pada alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945: “.... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; UUD NKRI 1945, Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rakyat menjadi pusat kekuasaan di negara *full* demokrasi, berasal dari rakyat dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

Setelah amandemen, pasal-pasal UUD NKRI 1945 menyatakan lebih jelas mengenai demokrasi. Penentuan kekuasaan

pemerintahan negara melibatkan rakyat langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (1)). Contoh lain, memisahkan kekuasaan eksekutif diatur Pasal 4 sampai Pasal 16, dan kekuasaan legislatif pada Pasal 19 sampai Pasal 22, serta kekuasaan yudikatif pada Pasal 24 UUD.

Ada beberapa varian dalam demokrasi seperti plutokrasi (*plutocracy*) dan oligarki (*oligarchy*). Plutokrasi adalah sistem pemerintahan dikendalikan orang-orang kaya. Dalam bahasa Yunani, *Ploutos* berarti kekayaan dan *Kratos* adalah kekuasaan. Mobilitas sosial berupa partisipasi rakyat terkendala dalam plutokrasi, kecuali bagi pengusaha kaya dan/atau bangsawan kaya. Para elit politik berasal dari kalangan itu-itu saja dalam kurun waktu lama. Oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan sedikit orang. Kata oligarki dari bahasa Yunani, yaitu *oligoi* yang artinya beberapa dan *arche* berarti memerintah. Oligarki dibangun oleh beberapa pihak melalui jalur sosial, politik, ataupun ekonomi; dan yang sering mendapat sorotan adalah dominasi mereka atas media masa, partai politik, dan jaringan bisnis atau industri.

Varian demokrasi itu terukur dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kita dapat merujuk publikasi *The Economist* (2011) yang menyatakan indeks demokrasi Indonesia pada peringkat 60, lebih tinggi dari Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos. Dari sisi ini, kita patut berbangga hati. Indonesia merupakan negara dengan tingkat demokrasi tertinggi di ASEAN setelah Thailand. Data *The Economist Intelligence Unit's Democracy Index* menyebut Indonesia pada tahun 2017 memperoleh skor 6,39 kategori *flawed democracy* (belum sempurna). Indeks demokrasi dimulai dari skor 0 (*authoritarian regime*) ke 10 (*full democracy*). Norway skor 9,87 masuk negara *full democracy*. Amerika Serikat masuk dalam *flawed democracy* skor 7,98. Negara yang masuk kategori otoriter adalah Congo (1,61).

BPS juga melakukan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI dirilis setiap tahun dengan skala 0-100 dengan pola yang sama. Rilis tahun 2017 nilai IDI 72,82 naik dibanding 2016 (70,09). Indeks terbaik yang dicapai Indonesia 73,04, masuk kategori sedang, di tahun 2014.

Profesor Boediono (2007) dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengatakan: “Dilema mendasar demokrasi, sejak Plato, adalah bagaimana memadukan rasionalisme dan populisme, pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang representatif, teknokrasi dan demokrasi.” Inilah dilema demokrasi di negara kita. Di satu sisi, kita ingin memacu pembangunan ekonomi dengan kebijakan rasional, konsisten dan berwawasan jangka panjang. Di sisi lain, sistem politik belum terlalu mantap dan tidak mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan rasional. Risiko distorsi cukup tinggi terhadap kebijakan rasional karena tidak jarang kepentingan partai politik mendominasi proses pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, tanpa mekanisme koreksi yang efektif atau tidak transparan pembahasannya. Pandangan ini dipertajam beliau (2016) bahwa ekonomi dan politik tidak dapat dipisah, sasaran ekonomi sering tunduk pada sasaran politik kecuali dalam situasi krisis. Gap antara sasaran politik dan ekonomi harus diatasi pengelola negara, di pemerintahan dan DPR.

Di era reformasi, pemerintahan pertama kali langsung dipilih rakyat adalah pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kala (SBY-JK) 2004–2009. Tiga Presiden di era reformasi, mulai Presiden BJ Habibie (21 Mei 1998–20 Oktober 1999), atau Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999–23 Juli 2001) dan Presiden Megawati Sukarnoputri (23 Juli 2001–20 Oktober 2004) tidak mengalami pemilihan langsung oleh rakyat. Presiden BJ Habibie menerima mandat dari Presiden Soeharto, sementara Presiden

Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati dipilih oleh sistem pemilihan yang masih melalui MPR (Azis, 2008).

Menurut Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), calon Presiden dan calon Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) harus menyusun visi, misi, dan program dalam program kampanyenya. Bila terpilih dalam proses pemilihan, visi, misi, dan program itu mewujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) dan itulah yang menjadi piagam politik anggaran pemerintah terpilih. RPJM/D itu setiap tahun dijabarkan dalam bentuk RAPBN/D yang diajukan ke DPR/D. Setelah disahkan DPR/D menjadi APBN/D kemudian dilaksanakan oleh Presiden/Kepala Daerah selama satu tahun fiskal. Uniknyanya, bila di beberapa negara lain usul anggaran negara dapat juga diajukan oleh legislatif, di Indonesia sesuai UUD NKRI 1945 Pasal 23 ayat 2, RAPBN hanya boleh diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dengan demikian, posisi Presiden/Kepala Daerah menjadi penting dan lebih menentukan politik anggaran sebagai wujud pilihan demokrasi. Inilah hakikat demokrasi sistem presidensial. Pihak eksekutif didahulukan mengambil inisiatif usulan anggaran, sementara legislatif punya hak menolak. Bila komposisi suara mayoritas koalisi partai di DPR mendukung Presiden, sudah dipastikan usul anggaran itu disahkan menjadi UU APBN. Sebaliknya, bila mayoritas koalisi partai di DPR berbeda dengan Presiden, muncul masalah baru. Presiden/Kepala Daerah mengelola pelaksanaan APBN/D yang disahkan dan bertanggung jawab atas dampak pengelolaan APBN/D bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kepemimpinannya.

Pada tahun 2001, Perubahan Ketiga UUD NKRI 1945 menghapus tugas MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN) sebagai program lima tahun pemerintahan. Karena Presiden tidak lagi dipilih MPR, program itu diserahkan langsung ke Presiden terpilih dengan menyusun RPJMN. Presiden juga merencanakan APBN tahunan dengan referensi RPJMN. RPJMN ini menjadi pedoman dan tanggung jawab Presiden serta menjadi ukuran kinerja pemerintahannya. Karena kalender politik tidak paralel dengan kalender fiskal, dimungkinkan dalam satu tahun fiskal ada dua Presiden yang berbeda melaksanakan satu UU APBN. Di samping itu, ada satu tahun rencana anggaran dari RPJMN seorang Presiden dilaksanakan oleh Presiden setelahnya.

Di Indonesia, tahun fiskal dimulai 1 Januari berakhir 31 Desember tiap tahun sementara tahun politik nasional dimulai 20 Oktober tiap lima tahun. Bila seorang Presiden memimpin satu periode maka 3 tahun efektif perencanaan dan pelaksanaan anggaran dikelola dalam kepemimpinannya. Tahun pertama kepemimpinannya di-*share* bersama Presiden yang digantikannya dan tahun kelima bersama Presiden yang menggantikannya. Bila dua periode berarti 8 tahun yang efektif. Sebagai contoh, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dilantik 20 Oktober 2014, masih harus menjalankan “sisa” tahun fiskal APBN 2014 (Oktober–Desember 2014) yang telah ditetapkan Pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI sebelumnya. Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla menetapkan RPJMN 2015–2019 tanggal 5 Januari 2015 dan pelaksanaannya sampai tahun 2019. Kemudian diteruskan dengan RPJMN 2020–2024 oleh Presiden yang terpilih pada 17 April tahun 2019 nanti, dan begitu seterusnya. Kejadian ini berulang tiap lima tahun, terutama pada tahun-tahun terjadi pergantian seorang Presiden. Karena itu, siapa pun Presidennya, kalau di lingkup daerah, Kepala Daerahnya, indikator-indikator kesejahteraan harus menjadi sentral dalam politik anggaran

dan semua kebijakan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lebih ideal lagi, bila persentase peningkatan kesejahteraan rakyat setiap tahunnya lebih besar dibanding persentase peningkatan jumlah APBN/D setiap tahun.

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA: UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Majelis dan hadirin yang saya muliakan,

UUD NKRI 1945 Pasal 23 ayat 1 berbunyi: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Perintah UUD ini sangat jelas dan tegas bahwa APBN/D tidak lain adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, sangat naif bila terjadi peningkatan APBN/D setiap tahun tetapi indikator kemakmuran atau kesejahteraan justru memburuk. Lalu, untuk siapa peningkatan APBN/D itu?

Tiga prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara seperti yang diinginkan UUD adalah keterbukaan (*transparency*), bertanggung jawab (*accountability* dan *responsibility*) dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*welfare*). Prinsip pertama, keterbukaan menjelaskan bahwa uang negara atau uang rakyat bukan uang orang per orang (*private*) tetapi uang milik seluruh rakyat (*public domain*). Oleh karena itu, uang negara atau uang rakyat itu harus dikelola secara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh seluruh rakyat. Informasi uang negara yang masuk dari mana saja dan yang keluar untuk belanja apa saja,

kecuali ditentukan lain oleh UU, harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Keterbukaan penting karena pengelolaan uang negara yang salah atau yang sia-sia mudah diawasi oleh seluruh rakyat untuk perbaikan. Dengan keterbukaan, APBN/D menjadi hak publik sehingga tidak layak APBN/D disebut rahasia negara. Prinsip kedua, bertanggung jawab menjelaskan rupiah masuk dan keluar dalam APBN/D harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Uang negara di UU APBN atau Perda APBD memang harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya dan tidak siapa pun boleh melanggarnya. Prinsip pertanggungjawaban ini yang dikenal dengan dogma kepatuhan atau governansi. Rupiah yang dibelanjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelolanya dapat berujung pada kasus hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip ketiga, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjelaskan UUD kita, khususnya setelah reformasi, menganut paham optimalisasi dalam pengelolaan uang negara. Artinya, tiap rupiah uang negara yang dikelola harus bisa menghasilkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Negara tidak membolehkan pengelolaan keuangan negara yang asal-asalan atau apalagi diselewengkan. Semua rupiah yang masuk, seperti pajak, jenis apa dan berapa besarnya tidak boleh diterapkan kecuali dengan pertimbangan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, jenis pajak yang dapat mengganggu gerak perekonomian rakyat dan menurunkan kemakmuran harusnya dicegah. Begitu juga setiap rupiah belanja pada pola alokasi belanja mana saja yang harus didorong agar menghadirkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus ada perhitungan tiap rupiah belanja tiap tahun yang maksimal menurunkan jumlah rakyat miskin di Indonesia. Contohnya adalah kombinasi alokasi belanja yang dapat sebanyak

banyaknya menciptakan lapangan kerja dan alokasi belanja yang tidak membolehkan orang miskin mati kelaparan.

Untuk memastikan pengelolaan uang negara sesuai dengan tiga prinsip di atas, perubahan ketiga UUD NKRI 1945 menetapkan BPK melakukan pemeriksaannya. Hal itu tertuang dalam Pasal 23E ayat 1: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri." Bebas dan mandiri bermakna BPK tidak di bawah pengaruh lembaga yang diperiksanya. Pada ayat 2 disebut: "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya." Bahkan di ayat 3 menyatakan: "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang." Bandingkan dengan naskah asli UUD 1945 tentang pemeriksaan pada Pasal 23 ayat 5: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat." UUD setelah perubahan lebih lengkap, ada perhatian lebih terhadap independensi BPK, melaporkan hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti sehingga tidak ada keuangan negara yang dikelola sia-sia.

UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK memperkuat posisi lembaga ini dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Yang dimaksud pengelolaan keuangan negara dalam UU ini, dalam BAB I Ketentuan Umum, adalah: "... seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban."; sedangkan pemeriksaan

adalah "proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara." Definisi pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan ini sama seperti yang tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Keuangan Negara didefinisikan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, yaitu: "... semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Apa saja yang dimaksud dengan Keuangan Negara itu, tertuang pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003, seperti antara lain memungut pajak, melakukan pinjaman, melakukan pelayanan umum, penerimaan dan pengeluaran, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Semua definisi dan lingkup keuangan negara itu adalah objek pemeriksaan BPK. BPK hanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab yang terkait keuangan negara.

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, jenis pemeriksaan ada tiga: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang kebetulan saya tanda tangani ketika sebagai Ketua BPK 2014--2017, tujuan pemeriksaan keuangan adalah: "... untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, atas kesesuaian standar akuntansi, kecukupan

pengungkapan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.”

Jadi opini BPK menunjukkan kewajaran laporan keuangan pemerintah atau lembaga yang diperiksa. Ada empat opini BPK yang sudah diketahui umum, yaitu: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan 4) Tidak Wajar (TW). Semua unit pemerintahan dan lembaga negara yang memperoleh opini WTP dari BPK sebagai hasil pemeriksaan keuangan dapat dikatakan telah mengelola tanggung jawab keuangan negara dengan wajar dan memadai. Dikatakan wajar dan memadai apabila pemeriksaan BPK tidak menemukan pengelolaan keuangan negara yang bersifat material dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Opini di bawah WTP berarti nilai kewajarannya juga berkurang, masih banyak keuangan negara yang belum dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Nilai uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu yang harus ditindaklanjuti oleh unit pemerintahan atau lembaga negara yang diperiksa.

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah: “... untuk menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas, dan kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan.” Ketiga aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah pokok dalam pemeriksaan kinerja, sehingga diperoleh gambaran uang negara yang diperiksa betul-betul telah dikelola berdasarkan aspek tersebut. Jadi, hasil pemeriksaan adalah rekomendasi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan sesuai dengan aspek-aspek itu. Artinya, seharusnya, tidak boleh ada uang negara yang dikelola secara sembarangan, lalai dan/atau pemborosan apalagi disengaja.

Tujuan pemeriksaan PDTT adalah dalam bentuk pemeriksaan sesuai (patuh) dengan ketentuan perundang-undangan.” Terakhir, tujuan pemeriksaan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah: “... untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.” Pemeriksaan ini dapat merupakan diskresi BPK atau bersifat tindak lanjut dari suatu pemeriksaan laporan keuangan atau atas permintaan pemerintah, lembaga perwakilan, atau aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus hukum, aparat penegak hukum juga meminta perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam proses penegakan hukum.

Hasil-hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada DPR/DPD/PRD serta Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota bersifat terbuka informasinya untuk umum, kecuali yang ditentukan lain dalam UU seperti informasi rahasia negara dan/atau informasi yang berindikasi unsur pidana. Dengan demikian, prinsip keterbukaan informasi hasil pemeriksaan APBN/D juga terpenuhi. Semua rekomendasi yang bersifat tindak lanjut sebagai hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang disebut dalam rekomendasi itu. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004. Dalam Pasal 20 ayat 3 disebutkan bahwa jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut itu dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Bahkan pada Pasal 26 ayat 2 UU yang sama disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban tindak lanjut rekomendasi BPK, diancam hukuman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta. Artinya, semua rekomendasi hasil pemeriksaan BPK memiliki kekuatan hukum, pemeriksaan yang dilakukan BPK sekarang dominan pemeriksaan keuangan, lalu pemeriksaan PDTT dan terakhir pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan keuangan umumnya dilakukan

pada semester I, sementara pemeriksaan kinerja dan PDTT pada semester II setiap tahun anggaran. Pemeriksaan keuangan di semester I adalah untuk memeriksa pengelolaan APBN/D tahun fiskal sebelumnya. Tren hasil pemeriksaan keuangan pemerintah terus membaik, artinya tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan juga membaik. Misalnya, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dari tahun 2004, baru tahun 2016 LKPP memperoleh opini WTP. Pemeriksaan LKPP berdasarkan pemeriksaan atas 85 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 1 Laporan Keuangan BPK (yang diperiksa Kantor Akuntan Publik). Dari 87 laporan keuangan itu, 79 opini WTP (91%), 6 opini WDP (7%) dan masih ada yang 2 TMP (2%). Pada 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana 411 LKPD memperoleh opini WTP (76%), 113 WDP (21%) dan 18 TMP (3%). Dari 34 provinsi, 33 provinsi yang opini WTP (97%). Padahal di tahun 2006 belum ada satu pun provinsi yang WTP. Dari 415 pemerintah kabupaten, 298 beropini WTP (72%) dan dari 93 pemerintah kota, 80 beropini WTP (86%).

Muncul pertanyaan, mengapa suatu pemerintahan yang memperoleh opini WTP tetapi pimpinan pemerintahannya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Kasus OTT umumnya menyangkut transaksi suap atau gratifikasi dari pihak ketiga kepada pejabat pemerintah atau pihak berwenang atas kewenangannya memberikan izin tertentu, memutuskan suatu proyek pemerintah, alokasi anggaran dengan *kickback*, memenangkan perkara, dan sebagainya. Intinya, pemberian yang tidak sah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Pihak ketiga untuk menyuap tidak menggunakan uang negara yang diperiksa BPK. Opini WTP hanya berhubungan dengan pemeriksaan uang negara, tidak uang pihak ketiga. Apabila

pemeriksaan BPK menemukan uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ditindaklanjuti, kasus ini pun dapat berakhir di penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi penting, karena bila tidak, banyak uang negara dengan mudah diselewengkan atau tidak dipertanggungjawabkan. Orientasi BPK adalah menegakkan hukum administrasi keuangan negara, sementara aparat penegak hukum memproses pidana atas uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Banyaknya pemeriksaan keuangan dan PDTT dibanding pemeriksaan kinerja menunjukkan fokus pemeriksaan BPK masih lebih menekankan pada kewajaran dan kepatuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan. Ke depan, pemeriksaan kinerja harus makin menjadi perhatian. Oleh karena, ini menyangkut dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu alokasi anggaran. Dengan pemeriksaan kinerja, alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan pencapaian indikator kesejahteraan dengan mudah terdeteksi (Rai, 2008, Lonsdale, 2011, Akbar dan Djazuli, 2015 dan Sarjono, 2016). Penelitian lain menyebut gaya kepemimpinan, komitmen, dan kegigihan pemimpin mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan (Adnan, 2011). Komitmen pemimpin pemerintahan menjadi kunci penting bagi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang berdampak bagi kesejahteraan. Pemimpin yang tidak komit dapat membuat anggaran seperti “tarian” yang mempesonakan demi keuntungannya atau pihak-pihak lain (Wildavsky, 2004).

Sebagai contoh, apakah alokasi anggaran kemiskinan telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif? Hal ini dapat diketahui melalui pemeriksaan kinerja. Secara statistik menjadi pertanyaan, mengapa APBN selama 19 tahun meningkat sampai lebih 800% dari Rp245T (1999) menjadi Rp2.200T (2018) tetapi angka kemiskinan hanya turun 45% pada periode sama dari 47,9

juta jiwa (1999) menjadi 25,95 juta jiwa (2018). Seolah-olah tidak ada hubungan antara peningkatan anggaran dan penurunan angka kemiskinan. Pertanyaan lain juga dapat diajukan terhadap penurunan tingkat pengangguran, Rasio Gini dan peningkatan IPM. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kiranya menjadi fokus yang harus dijawab oleh pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja yang komprehensif, yang didukung pemeriksaan tematik, harusnya dapat menemukan masalahnya. Misalnya, apakah ada alokasi anggaran yang kurang efektif atau ada inefisiensi pengelolaan anggaran. Dengan demikian, rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja keuangan negara digunakan untuk memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab keuangan negara bukan hanya kesesuaian dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran (*accountability*) tetapi lebih utama adalah dengan prinsip pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat seperti yang diamanatkan cita-cita kemerdekaan (*responsibility*). Dengan demikian, diyakini pemeriksaan keuangan negara, khususnya pemeriksaan kinerja, dapat memperbaiki pola pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan.

SIMPULAN

Hadirin yang saya muliakan,

Saya ingin menutup uraian saya dengan beberapa simpulan. Pertama, saya ingin menyatakan bahwa perjalanan sejarah kehidupan bernegara kita sudah sesuai dengan tujuan kemerdekaan, dengan beberapa catatan. Era reformasi mempertegas prinsip-prinsip kita bernegara dengan baik. Kedua, pengelolaan keuangan negara pun semakin hari semakin baik dan diawasi serta diperiksa dengan baik pula. Pengelolaan keuangan negara baru beberapa tahun mulai dikaitkan dengan indikator

kesejahteraan rakyat. Ke depan perhatian kepada hubungan pengelolaan keuangan negara dengan kesejahteraan rakyat harus makin diukur dan diperiksa dengan baik. Ketiga, pemeriksaan keuangan negara masih menekankan pada prinsip kepatuhan pada perundang-undangan, belum pada tanggung jawab untuk terciptanya kesejahteraan. Pemeriksaan keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat harus makin diperkuat sehingga makin mendorong setiap rupiah menghasilkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya muliakan,

Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya berterima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya kepada saya. Juga, sholawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada sahabat dan rekan kerja serta seluruh staf yang tidak dapat disebut satu per satu, baik ketika di DPR RI, BPK RI saat ini, dan banyak tempat lain dimana saya berinteraksi. Dari lubuk hati terdalam, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua kerja sama dan sumbangan pemikirannya. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah SWT.

Saya ucapkan penghargaan yang tinggi kepada Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga; Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Majelis Guru Besar Universitas Airlangga; para Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga; Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Airlangga; serta seluruh Civitas Akademika Universitas Airlangga.

Saya bahagia dan bangga mendapat kepercayaan menjadi bagian keluarga besar Universitas Airlangga.

Saya berutang dan selalu berdoa untuk ibu saya (almh.) Dahniar Thaher yang mendidik saya dengan lembut serta mencontohkan kesabaran tanpa batas untuk mencapai yang terbaik. Juga doa untuk ayah saya (alm.) Abdul Azis Abbas. Saya masih ingat suatu saat ayah menendang pantat saya ketika melihat rapor SMA saya yang banyak warna merahnya. Katanya, “Kalau begini, sekolah kamu sia-sia! Sekolah itu untuk menguasai ilmu. Kamu jadi orang dengan ilmu. Dengan menguasai ilmu, kamu menguasai dunia dan akhirat. Ilmu itu sangat penting.” Ucapan ayah saya terbukti, ketika saya menjadi Ketua BPK, berkat kerja keras Tim BPK, selama sejarah, untuk pertama kalinya BPK di tahun 2015 dipercaya dunia (168 negara anggota) menjadi Pemeriksa Badan Dunia Energi Atom (*International Atomic Energy Agency*) yang berkedudukan di Wina, untuk anggaran tahun 2016–2019. Saya juga berterima kasih kepada kakak tertua saya, Dr. Wirda Azis, yang membiayai saya dari SMP sampai S1, dan dorongan seluruh saudara-saudara saya, yang terus menyemangati saya untuk maju.

Dunia terus berputar dan usia semakin senja, matahari telah di ufuk yang setiap saat terbenam. Saya ingin menjadi orang yang dikenang dengan doa-doa yang baik. Saya selalu mendorong orang-orang di sekitar saya terus menjadi lebih baik. Untuk istri tercinta Amanah Abdulkadir M.A., Ph.D., terima kasih telah sabar dan tegar mendampingi hidup saya selama ini dan membesarkan anak-anak kami: pertama, Mina Azhar M.Sc. bersuami Juan Pablo Duarte Sepulveda, Ph.D. dan cucu kami Rafi Duarte-Azhar. Kedua, Hanifah Azhar, S.T. bersuami Andika Prasetya Suherman Putra, S.T. serta cucu kami Aksara Kai Suhaz, dan anak bungsu kami Ibrahim Azhar, yang masih kuliah. Mereka

semua menjadi inspirasi hidup saya. Pengukuhan Guru Besar ini, saya persembahkan untuk mereka. Saya juga ingin menyebut mertua saya, ibu istri saya, Yun Fathia Shaleh, walau sudah sangat tua mau hadir pada acara ini sebagai wujud cintanya pada kami, anak-cucu dan cicitnya. Saya sangat bersyukur dikaruniai kehidupan seperti ini dan terus berdoa lebih baik sampai akhir kehidupan nanti. Aamiin, ya Allah.

Demikian dan terima kasih.

*Wabillahirraufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah dan Djazuli, Achmad, 2015, *Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat, Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013*, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara Vol. 1 No. 1 Juli 2015, BPK RI.
- Andrianto, Nico, 2006, *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*, Penerbit Bayumedia, Malang.
- Arthur Dunham, 1965. *Community Welfare Organization: Principles and Practice*, New York, Thomas Y. Crowell Co.
- Aritonang, Baharuddin, 2017, *Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan*, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas.
- Azis, Harry Azhar, 2008, *Kinerja Pemerintahan SBY-JK di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Jurnal Sekretariat Negara RI No 07.
- _____, 2012, *Democracy and Debate: The Role of Knowledge*. Jakarta: AusAID Conference.
- _____, 2011, *Politik Anggaran Kebijakan Dana Perimbangan*, Jakarta: Konsultasi Publik.
- _____, 2016, *Audit Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Pusat Kajian Keuangan Negara.
- _____, 2016, *Amanah Sampai Akhir*, Jakarta: Sang Gerilya Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015, *Rencana Strategis BPK 2016-2020*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Indeks Kebahagiaan*, Jakarta: BPS.
- _____, 2016, *Berita Resmi Statistik No. 57/06/Th. XIX*, 15 Juni 2016, Jakarta: BPS.

- _____, 2016, *Berita Resmi Statistik No. 73/08/Th. XIX*, 03 Agustus 2016, Jakarta: BPS.
- _____, 2016, *Berita Resmi Statistik No.79/08/Th. XIX*, 19 Agustus 2016, Jakarta: BPS
- _____, 2016, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*, Jakarta: BPS.
- _____, 2017, *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator, 2009-2016*, link: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/12/21/1276/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator-2009-2016.html>, diakses 27-06-2018.
- Baiquini, Ahmad, 2015, *Kisah Umar bin Khattab dan Ibu Pemasak Batu*, <https://www.dream.co.id/your-story/kisah-khalifah-umar-bin-khattab-dan-ibu-pemasak-batu-151103d.html>
- Boediono, 2007, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, UGM.
- _____, 2016, *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung, Mizan Pustaka.
- Fanani, Zainuddin, 1996, *Pembangunan Berwawasan Martabat Manusia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harun, 2009, *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hatta, Muhammad, 1981, *Kumpulan Pidato*, I Wangsa Wijaya dan Meutia F. Swasono. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Hidayat, L., Misbah, 2007, *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden (Bachrudin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husna, Nurul, 2014, *Jurnal Al-Bayan Vol 20, No 29, Januari - Juni*
- Ichwanuddin, Wawan & Harris, Syamsuddin, 2014, *Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat*, LIPI Press, Jakarta.

- Ika, Syahrir, 2014, *Serial Edukasi Fiskal, Jilid 1*, Penerbit Nagamedia, Jakarta.
- Indonesia-Investment, *Kemiskinan di Indonesia*, <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?>
- Kuncoro, Mudrajad, 2012, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kurniawan, Alek K., 2018, *Lebih Jernih Melihat Pergeseran Angka Kemiskinan* <https://beritagar.id/artikel/telatah/lebih-jernih-melihat-pergeseran-angka-kemiskinan>
- Lonsdale, J., dkk. (2011). *Performance Auditing: Contributing to Accountability in Democratic Government*, Edward Elgar Publishing Limited, UK.
- Lukito, Penny Kusumastuti, 2014, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Madjid, Nurkholish, 2009, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Penerbit Paramadina bekerjasama dengan Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Nasution, Anwar, 2008, *Pokok Pikiran Anwar Nasution: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- _____, 2015, *Policy Making; Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- _____, & Wrihatnolo, Randy R., 2011, *Managemen Perencanaan Pembangunan: Panduan Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Menurut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Poernomo, Hadi, 2014, *E-Audit Untuk Rakyat: Menciptakan Efisiensi dan Efektifitas Pemeriksaan BPK*, Badan Pemeriksa Keuangan.
- _____, 2014, *BPK Ada Dimana-mana, Kumpulan Pidato Ketua BPK RI Hadi Poernomo Masa Bakti 2009-2014*, Badan Pemeriksa Keuangan.
- Rai, Agung, 2008, *Audit Kinerja: Teori dan Aplikasi pada Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sarjono, 2016, *Hasil Audit, Jabatan Gubernur, Kinerja Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Liquidity Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2016
- Sen, Amartya, 2009, *The Idea of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
- Siaroff, Allan, 2005, *Comparing Political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics*, Broadview Press.
- Sibuea, Hotma P., 2014, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta. (hal 142-143)
- Smith, T V, Lindeman, Eduard C, 1953, *The Democratic Way of Life*, Unknown Binding.
- Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya, & Fitoussi, Jean-Paul, *Report by the Stiglitz Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, link: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report>.
- The Economist*, 2011, *Democracy index 2011: Democracy under stress, A report from the Economist Intelligence Unit*, link: https://www.sida.se/globalassets/global/about-sida/sa-arbetar-vi/eiu_democracy_index_dec2011.pdf, accessed 27-06-2018.
- The Economist Intelligence Unit's Democracy Index, <https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/>
- Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith, 2012, *Economic Development*, 11th ed. Pearson Addison Wesley.
- UNDP, 2018, *Human development Indices and Indicators 2018 Statistical Update*, New York.

Wildavsky, A, 2004, *The New Politics of Budgetary Process*, Fifth Edition, Pearson Education Inc., United States.

Winarni, Rahmawati Retno dan Jalal, 2018, *Menghentikan Lelucon Ekonomi Bertajuk Trickle Down Effect*, <https://www.tuk.or.id/menghentikan-lelucon-ekonomi-bertajuk-trickle-effect/>

PERATURAN PERUNDANGAN:

UUD NKRI 1945 naskah asli.

UUD NKRI 1945 hasil Amandemen dan Penjelasannya, Penerbit Permata Bangsa.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

UU Nomor 10 tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011.

UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan ABPN Tahun Anggaran 2014.

UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : **Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D.**
 NIP/NIDN : -
 Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956
 Jabatan : Anggota VI BPK RI (Mei 2017 s.d. Sekarang)
 Nama Istri : Amanah Abdulkadir, M.A., Ph.D.
 Nama Anak/ Menantu : 1. Mina Azhar, M.Sc./ Juan Pablo Duarte Sepulveda., Ph.D.
 2. Hanifah Azhar, S.T./ Andika Prasetya Suherman Putra, S.T.
 3. Ibrahim Azhar
 Cucu : 1. Aksara Kai Suhaz
 2. Rafi Duarte-Azhar
 Alamat kantor : Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 Gedung Tower Lantai 17
 Jalan Jendral Gatot Subroto 31
 Jakarta Pusat
 Telpn: 021-25549000
 E-mail : ha_azis@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **Ph.D. in Economic**, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat, 1994–2000
2. **Master of Arts, in Economic Public Policy**. University of Oregon, Eugene, Oregon, Amerika Serikat, 1988–1990
3. **Sarjana Manajemen Industri**, Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1981–1985.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017–2019
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2014–2017
3. Ketua Badan Anggaran DPR RI 2009–2010
4. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI 2008–2009
5. Anggota Komisi XI DPR RI, 2004–2009
6. Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan Negara, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan) DPR RI 2010–2014
7. Ketua Panja RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah 2011–2014
8. Ketua Panja Suku Bunga Komisi XI DPR 2010–2012
9. Anggota Pansus RUU OJK 2010–2011
10. Ketua Panja Inflasi Komisi XI DPR RI 2010–2011
11. Ketua Panja RUU Mata Uang 2009–2010
12. Ketua Panja RUU Akuntan Publik 2009–2010
13. Anggota Tim Pengawas Bantuan Bencana Alam Aceh/Sumut DPR RI, 2005–2009
14. Anggota Pansus Paket RUU Perpajakan (KUP, PPh dan PPn/BM) DPR RI, 2005–2009
15. Ketua Pansus RUU Pajak Daerah/Retribusi Daerah DPR RI, 2006–2008
16. Anggota Pansus RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) DPR RI, 2008
17. Anggota Pansus RUU Perbankan Syariah DPR RI, 2007–2008
18. Anggota Badan Musyawarah DPR RI, 2007–2008
19. Anggota Pansus RUU RPJPN Tahun 2005–2025 DPR RI, 2007
20. Anggota Pansus RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPR RI, 2006
21. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 2004–2005
22. Anggota Komisi Konstitusi (MPR-RI), 2003–2004
23. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Kosgoro, Jakarta, 2003–2004
24. Business Development Expert Badan Operasi Bersama (BOB) PT Pertamina- PT Bumi Siak Pusako, 2002–2003
25. Economist pada United States Agency for International Development (USAID), Jakarta, 2002–2003
26. Tim Ahli PAH II BP MPR-RI, 2001 dan 2002
27. Staf Ahli Fraksi Partai Golkar MPR RI, 2001–2004
28. Editor Eksekutif Jurnal Ekonomi STEI, Jakarta, 2000–2003
29. Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001–2003
30. Dosen Pasca Sarjana UPN “Veteran”, Jakarta, 2001–2003
31. Dosen Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2000–2003
32. Dosen Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2000–2003
33. Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), 2000–2005
34. Reviewer Journal of Asian Business, University of Michigan, USA, 1995–2003
35. Research Associate Oklahoma State University, USA, 1994–1996
36. Pembantu Ketua/Dekan III STEI, Jakarta, 1991–1993
37. Dosen STIMA KOSGORO, Jakarta, 1991–1993
38. Dosen Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1991–1993

39. Dosen APP Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1987–1994 dan 2000–2002
40. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1987–2003
41. Dosen Universitas Islam Assyafii'iyah, Jakarta, 1986–1990
42. Peneliti Senior *Pan Asia Research*, Jakarta, 1985–1987 dan 1990–1993
43. Wadirut CV. Indonesia Exp (*Money Changer*), Denpasar-Jakarta-Spore, 1979–1982

PENGHARGAAN

1. Scholarship Award for ASEAN Youth, kerja sama Pemerintah Jepang dan Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga RI, 1987 dan 1993
2. Program Award for Young Leaders, USIA, Jakarta-Washington DC, 1986
3. Mahasiswa Teladan APP Departemen Perindustrian RI, 1976
4. Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan oleh IPDN Tahun 2015.

RIWAYAT ORGANISASI

1. Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islan (KAHMI) periode 2017–2022
2. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar 2009–2015
3. Ketua Bidang Ekonomi PPK KOSGORO 2008–2013
4. Wakil Ketua Sub bidang Ekonomi, BAPPILU Pusat Partai Golkar, 2008–2009
5. Departemen EKKU dan UKM DPP Partai Golkar 2004–2009
6. Wakil Ketua Dewan Penasehat PP AMPG, 2003–2005

7. Dewan Penasehat DPP AMPI, 2003–2008
8. Wakil Ketua EKUIN BALITBANG DPP Partai Golkar, 2003–2005
9. Anggota Bidang Kampanye BAPPILU DPP Partai Golkar, 2004
10. Senior Adviser PERMIAS, Stillwater, Oklahoma, Amerika Serikat, 1996–2000
11. Sekretaris Umum Bamus PTS Se-Indonesia (sekarang APTISI), Jakarta, 1991–1995
12. Dewan Pertimbangan Pemuda DPP KNPI, 1984–1987
13. Majelis Pertimbangan Pemuda DPP KNPI, 1987–1990
14. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), 1983–1986
15. Sekretaris Jenderal PB HMI, 1981–1983
16. Dewan Penasehat Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1982–1983
17. Presidium Dewan Mahasiswa Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1977
18. Pemimpin Redaksi Majalah Kampus APP Departemen Perindustrian RI, Jakarta, 1976–1978

KEAHLIAN KOMPUTER

Gauss, Gams, SAS, Shazam, SPSS, Lotus, WP, MS, Excel, Power Point.

KEAHLIAN MENGAJAR

Certification of Completion, All requirements in “Quality University Instruction: Teaching Effectiveness Program” (1998, Oklahoma State University), 1999.

KARYA ILMIAH**DISERTASI**

Perubahan Struktural pada Kebutuhan Impor Tekstil dari Negara-Negara Berkembang, Disertasi, 2000.

BUKU

1. Buku *Audit untuk Kesejahteraan Rakyat*, 2016..
2. Buku *Benang Merah Perubahan: Tekstil dan Kesejahteraan Rakyat di Negara Berkembang*, 2017.
3. Buku *Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat*, 2017.
4. Buku *Kebijakan Ekonomi dan Moral Politik Pemerintah*, 2017.
5. Buku *Krisis Global, Fraud, dan Demokrasi Pendidikan* (Ragam Pemikiran Pengelolaan Keuangan Negara dan Permasalahan Bangsa), 2017.
6. Buku *SDM Berintegritas, Inflasi, dan Industri Perkapalan* (Ragam Pemikiran Berbagai Potensi, Peluang, dan Permasalahan Bangsa), 2017.
7. Buku *Zakat dan Pemberdayaan*, 2017.

JURNAL

1. "Business Strategy of Success Factors of Enterprise Resource Planning System (ERP) and the Impact Towards the Quality of Accounting Information" *International Journal of Economic Research*, Vol 14, Number 12, 2017.
2. "Comparative Advantage Analysis And Products Mapping Of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, And Vietnam Export Products", *Journal Of Developing Economies*, June 2017; 02(1): 12--27.

3. "Keterlibatan Indonesia dalam Perdagangan Tekstil dan Pakaian", *Jurnal Mozaik Humaniora*, Vol 16 No 2 Juli-Desember 2016.
4. "Peta Persaingan Produk Ekspor Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand", *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Des 2016, 01(2): 1-16 2085--4617
5. "Inflasi dan Kemiskinan", *Jurnal Sekretariat Negara*, No.19 Tahun 2011.
6. "Indonesia: Sebuah Negara Kesejahteraan?", *Jurnal Politika*, Vol 2 No.3 Tahun 2006.
7. "Prediksi Ekonomi Indonesia 2004," Seminar 10 Tahun *Jurnal Ekonomi STEI*, Jakarta, 11 April 2002.
8. "Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Krisis," *Jurnal Ekonomi STEI*, Januari-Maret 2002.
9. "Ekonomi Politik Usaha Kecil dan Menengah (UKM), *Jurnal Ekonomi STIE Indonesia*, No.4/Vol 10/Desember 2001.
10. "AFTA: From Negotiation to Market Mechanism", *Jurnal Ekonomi STIE Indonesia*, No.17/TH.X/Juli-September 2001.
11. "Karya Ilmiah Untuk Jurnal Ekonomi", *Jurnal Ekonomi STIE Indonesia*, No.16/TH.X/April-Juni 2001.
12. "Ekonomi Politik Money Laundering", *Jurnal Ekonomi STIE Indonesia*, No.15/TH.X/Jan-Maret 2001.
13. "Ekonomi Politik Krisis di Indonesia," *Jurnal STEI*, September 2000.
14. "Serikat Buruh Meningkatkan Produktivitas Kerja?" *Jurnal STEI*, Juli 1994.
15. "Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia" *Jurnal Ekonomi STIE Indonesia*, No.4/TH.II/Agustus 1993.
16. "Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia," *Jurnal STEI*, Agustus 1993.
17. "Sistem Ekonomi Pancasila: Analisis Perspektif," *Jurnal STEI*, Juni 1992.

MAKALAH

1. "Peran BPK dan Mahasiswa dalam Mengawal Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Negara", Wisuda Sarjana Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta, 25 September 2018.
2. "Peran Mahasiswa dalam Mengawal Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Negara", STEI Rawamangun, 18 Mei 2018.
3. "Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan, 29 April 2018.
4. "Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Universitas Warmadewa, 12 April 2018.
5. "Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", IAIN Padangsidimpuan, 05 Februari 2018.
6. "Audit untuk Kesejahteraan Rakyat", Universitas Sam Ratulangi, 31 Januari 2018.
7. "Keuangan Negara harus untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat", Universitas Negeri Gorontalo, 30 Januari 2018.
8. "Pengelolaan Keuangan Negara dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", Badan PPSDM Kesehatan, Batam, 15 Desember 2017.
9. "Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Politeknik Sukabumi, Sukabumi, 13 November 2017.
10. "Pengelolaan Keuangan Negara dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", Poltekkes Papua, Papua, 30 Oktober 2017.
11. "Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 18 September 017.
12. "Audit untuk Kesejahteraan Rakyat", Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 11 Agustus 2017.
13. "Pengelolaan Keuangan Negara dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", Poltekkes Makassar, Makassar, 05 Agustus 2017.
14. "Peran BPK melalui Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat" dalam acara Wisuda Sarjana Program Studi Manajemen dan Akuntansi, STIE Ibnu Sina, Batam, 13 Mei 2017.
15. "Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat " dalam acara *Goes To Campus* di Institut Agama Islam Nurul Jadid, Probolinggo, 27 Februari 2017.
16. "Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat " dalam acara kuliah umum di Universitas Jambi, Jambi, 6 Februari 2017.
17. "Tata Kelola Bank Daerah Seiring Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara", Seminar Nasional, Pekanbaru, 23 Januari 2017.
18. Aktualisasi BPK Dalam Membangun Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Menuju *Good University Governance*, Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM), di UNM, Manado, 20 Januari 2017.
19. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam acara kuliah umum di Universitas Negeri Makasar, Makasar, 19 Januari 2017.
20. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat: Sinergi Pengembangan Kompetensi Pemeriksa dan Pengawas Keuangan Negara", Makasar, 10 Jan 2017.
21. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam acara kuliah umum di Universitas Ar Raniry, Aceh, 6 Januari 2017.

22. Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif dan Efisien dalam Rangka Menciptakan *Good Government And Clean Governance* dalam acara Workshop Anti Korupsi, diselenggarakan oleh Kemensos, Jakarta, 22 Desember 2016.
23. "Perwujudan Kehadiran Negara yang Kuat Melalui BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam acara kuliah umum di STIE Swadaya, 15 Desember 2016.
24. "Politik Anggaran dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Rakyat", di Workshop Nasional Anggota FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Jakarta, 14 Desember 2016.
25. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam acara kuliah umum di STIE Ahmad Dahlan, Cirendeu, Jakarta Selatan, 30 November 2016.
26. "Perwujudan Kehadiran Negara yang Kuat Melalui BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam acara kuliah umum di Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, 28 November 2016.
27. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam acara kuliah umum di UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 7 November 2016.
28. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" dalam acara kuliah umum di STIE Rawamangun, 04 November 2016.
29. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" Makalah Dalam Acara Kuliah Umum Di Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik, 31 Oktober 2016.
30. "Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa", Makalah dalam Seminar Peningkatan

- Kapasitas Penggunaan Dana Desa Secara Benar, Tulungagung, 29 Oktober 2016.
31. "Pengelolaan Keuangan Negara yang *Accountable* untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" Makalah dalam Acara Diklatnas IV HIPMI, Lemhannas, Jakarta, 12 Oktober 2016.
32. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 12 Okt 2016.
33. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjung Pinang, 02 Okt 2016.
34. "Inovasi Manajemen Kepemimpinan *Transformative* di BPK", Makalah Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 01 Okt 2016.
35. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Makalah Orasi Ilmiah Wisuda Gelombang III Universitas Mulawarman, Samarinda, 27 Sept 2016.
36. "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Indonesia", Makalah Kuliah Umum di Universitas Udayana, Bali, 22 September 2016.
37. "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia", Makalah Kuliah Umum di Universitas Andalas, Padang, 16 September 2016.
38. "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia", Makalah Kuliah Umum di Universitas Negeri Padang, Padang, 16 September 2016.
39. "Peran BPK dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Bank Indonesia", Makalah Seminar Financial Reporting Governance Bank Indonesia (BI), Depok, 19 Mei 2016.

40. "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia", Makalah Sidang Senat Terbuka dan *Dies Natalis* Ke-52 Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, 16 Mei 2016.
41. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 13 Mei 2016.
42. "Aktualisasi BPK dalam Membangun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang Bersih Dan Berwibawa" Makalah pada Rakernas Forum Wakil Rektor / Pembantu Rektor II Perguruan Tinggi se-Indonesia, Palu, 10 April 2016.
43. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Tadulako, Palu, 07 April 2016.
44. "RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Manfaatnya bagi Bangsa", Makalah Seminar Nasional oleh Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan, Jakarta, 5 April 2016
45. "Langkah Strategis BPK untuk Mengatasi Korupsi, Makalah Kuliah Umum di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 1 April 2016.
46. "Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" Makalah Orasi Ilmiah di Universitas Nasional, Jakarta, 26 Maret 2016.
47. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Sinjai, Sinjai, 29 Maret 2016.
48. "Peran BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang, 14 Maret 2016.
49. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Jember, Jember, 4 Maret 2016.

50. "Tugas dan Fungsi BPK dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Pada CEO Talk The Walk di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 26 Februari 2016.
51. "Sudut Pandang BPK Terhadap Pencegahan Kerugian Negara pada Kegiatan Sarana pan Prasarana" Makalah pada Sosialisasi Pencegahan Kerugian Negara pan Pengadaan Sarana Prasarana, Yogyakarta, 26-28 Februari 2016.
52. "Pembentukan SDM Berintegritas untuk Indonesia Lebih Baik", Makalah pada Acara Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 56 LPDP, Jakarta, 15-20 Februari 2016.
53. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Nusa Nipa, Kupang, 11 Februari 2016.
54. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Nusa Cendana, Kupang, 11 Februari 2016.
55. "Membangun Budaya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien", Makalah Seminar Nasional KAHMI, Kupang, 11 Februari 2016.
56. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Islam Riau, Riau, 29 Januari 2016.
57. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Tanjungpura, Pontianak, 15 Januari 2016.
58. "Formulasi Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat: Dari Formulasi Hingga Evaluasi", Makalah Kuliah Umum di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, 26 November 2015.
59. "Peran BPK dalam Mewujudkan *Good Governance* di Daerah" Makalah Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 27 November 2015.

60. "Aktualisasi Peran BPK dalam Membangun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang Bersih dan Berwibawa", Makalah Kuliah Umum di Universitas Brawijaya, Malang, 27 November 2015.
61. *"BPK's Roles To Enhance Government Agencies' Compliance To Regulation Through Bureaucratic Reform"*, Makalah Pada ASEAN Civil Service Innovation Conference, Malaysia, 18 November 2015.
62. "Pemeriksaan BPK: Peluang dan *Opportunity* untuk Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Umat", Makalah Diskusi Panel Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Hotel Sahid, Jakarta, 13 November 2015.
63. "BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Makalah Pada Ceramah Mata Pelajaran Pembekalan BPK Kepada Pasis Seskoau A-52 TP 2015, Lembang, 27 Oktober 2015.
64. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Surabaya, 30 Oktober 2015.
65. "Meneguhkan Integritas untuk Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa", Makalah Seminar pada Puncak Gema Muharam 1437H dan Pengukuhan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Dan FORHATI Surabaya, Surabaya, 28 Oktober 2015.
66. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Khairun, Ternate, 26 Oktober 2015.
67. "Peran Negara, Kepemimpinan, dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah pada Seminar Nasional di Universitas Hasanuddin, Makassar, 22 Oktober 2015.
68. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Dies Natalis Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjung Pinang, 10 Okt 2015

69. "Politik Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Nasional, Jakarta, 9 Oktober 2015.
70. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Seminar di Universitas Lampung, Lampung, 21 September 2015
71. "Audit untuk Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum pada Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 14 September 2015.
72. "Audit untuk Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum pada Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 18 September 2015.
73. "Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Rangka Pengelolaan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik (Good Governance), Makalah Kuliah Umum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 3 September 2015.
74. *"Strengthening Islamic Economic And Financial Institution For The Welfare Of Ummah"*, Makalah Pada *International Conference And Ph.D Colloquium On Islamic Economics And Finance*, Mataram, 25 Agustus 2015.
75. "Peran KAHMI dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik", Makalah pada Halal Bi Halal KAHMI Rayon UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 09 Agustus 2015.
76. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah pada Dialog Terbuka di Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, 27 Agustus 2015.
77. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Seminar di Universitas Syam Ratulangi, Manado, 11 September 2015.
78. *Script BPK's Board Member Meet And Greet With The Comptroller General Government Accountability Office (GAO)*, Tuesday, May 19th, 2015

79. Makalah Orasi Kebangsaan, Universitas Bhayangkara Surabaya, 10 Mei 2015.
80. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Seminar Pada Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, 04 Mei 2015.
81. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, 10 April 2015.
82. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Orasi Ilmiah dalam Wisuda Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Ke-82, Surabaya, 29 Maret 2015.
83. "Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Seminar di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, 17 Maret 2015.
84. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Orasi Ilmiah dalam Wisuda Sarjana XVI, Dies Natalis, XXV dan Inaugurasi 2015 STIE Gotong Royong, Jakarta, 14 Maret 2015.
85. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Riau, Riau, 13 Maret 2015.
86. "Tax Amnesty: Mengenalkan Tax Amnesty Di Indonesia", Makalah pada Seminar Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Jakarta, 10 Maret 2015.
87. "Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Airlangga, 06 Maret 2015.
88. "Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Andalas, Padang, 23 Februari 2015.
89. "Transformasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Kuliah Umum di Universitas Bung Hatta, Padang, 23 Februari 2015.
90. "Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Seminar Di Universitas Mulawarman, Samarinda, 19 Januari 2015
91. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" Makalah Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 14 November 2015.
92. "ASEAN Community-The Role Of Public Accountability", Makalah Di Razak School Of Government, Malaysia, 13 Februari 2015.
93. Makalah Workshop Persiapan Pemeriksaan LKKP Dan LKKL TA 2014, BPK, 12 Januari 2015.
94. Paper Of The Chairman Of The Audit Board Of The Republic Of Indonesia (BPK-RI) Dr. H. Harry Azhar Azis Presented In The Focus Group Discussion (FGD) With Academics, Government Officials, And Activists Throughout West Sumatra In The Office Of West Sumatra Representative Office Of BPK, On 24 December 2014.
95. "ASEAN Integrated Accounting Profession For Sustainable Economic Growth", Makalah Kongres XII IAI, 17-19 Desember 2014.
96. "Participative Government – Meningkatkan Partisipasi Publik Demi Efektifitas Pemerintahan" Makalah Seminar dalam Rangka Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 17 Desember 2014.
97. "Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Ketahanan Nasional" Makalah Pembekalan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Angkatan II, Jakarta, 1 Desember 2014.

98. "BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Makalah Sosialisasi di Universitas Syiah Kuala, Aceh, 28 November 2014.
99. "Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Ketahanan Nasional" Makalah Pembekalan dan Pementasan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Angkatan I, Jakarta, 28 November 2015.
100. "Good Corporate Governance-Improving Financial Report For Better Public Accountability", Makalah pada Acara *Interactive Dialogue*-Universitas Sampoerna, Jakarta, 27 November 2015.
101. "Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat", Makalah Orasi Ilmiah Wisuda STIE Jakarta Ke-42, Jakarta, 16 November 2014.
102. "Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan", Makalah Dialog Nasional Kebijakan Ekonomi, Jakarta, 13 November 2015.
103. "Formulasi Pemeriksaan BPK Untuk Kesra", Makalah FGD BPK, Bandung, 27 Oktober 2015.
104. "Transformasi BUMN di Tengah Kriminalisasi Pejabat BUMN", Makalah Seminar Nasional, Hotel Shangrila, Jakarta, 23 Oktober 2015.
105. "Memaksimalkan Peran Audit Kinerja BPK Untuk Kesejahteraan Rakyat", Disampaikan pada sosialisasi audit kinerja dan kesejahteraan rakyat, Batam, 31 Oktober 2014.
106. "Perspektif Politik Ekonomi dan Pengawasan Otorita Batam", disampaikan dalam diskusi perspektif politik ekonomi dan pengawasan otorita Batam, 17 Oktober 2014.
107. "Upaya Meningkatkan Audit Kinerja BPK," Makalah FPT Anggota BPK RI, 30 Juni 2014.
108. "Mahkamah Konstitusi dan Banggar DPR", *Kontan*, 2 Juni 2014.
109. "Arah Politik Anggaran dalam Mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal," Makalah Diskusi Pakar dan Pengambil Kebijakan, Hotel Borobudur, 17 Desember 2013
110. "Pembiayaan dan Pembinaan UMKMK sebagai Bagian dari Financial Inclusion", HUT PT PNM ke-14, Gedung SMESCO, Jakarta, 1 Juni 2013.
111. "Indonesia Economic Outlook 2013-2015", Round Table Discussion, dengan tema "Indonesia Economic Outlook 2013-2015". Jakarta, 7 November 2012.
112. "Latar Belakang dan Harapan Pembentukan OJK", pada *The 6th Jakarta Risk Management Convention*, dengan tema "Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan ke Depan". Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta, 11 Oktober 2012.
113. "Urgensi RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dalam Penyelamatan Keuangan Negara", Seminar sehari dengan tema "Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam Konteks RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah". Rabu, 10 Oktober 2012. Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta
114. "Demokrasi dan Politik Anggaran", pada AusAID Conference, dengan tema "*Democracy and Debate: The Role of Knowledge*". Aryaduta Jakarta Hotel, 2 Oktober 2012.
115. "Mewujudkan Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan", Seminar Nasional dengan tema "Menuju Indonesia Emas: Tantangan dan Prospek Ekonomi dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 15 September 2012.
116. "Demokrasi Ekonomi dan Pendidikan", "Peluncuran Buku "Demokrasi Perubahan dan Pembangunan di DKI". Jakarta, 12 September 2012.

117. "Disain Perundang-Undangan Stabilitas Sistem Keuangan", Rapat Komite Informasi dan Manajemen Resiko. LPS, Jakarta, 27 Juli 2012.
118. "Financial Inclusion, Economic Growth, and Welfare System", International Conference "Financial Inclusion, Economic Growth, and Welfare System". Diamond Solo Convention Centre. Solo, 17 Juli 2012.
119. "Efektivitas Anggaran untuk Menangkal Tekanan Fiskal", pada Kajian Tengah Tahunan (KTT) INDEF 2012, dengan tema "Efektivitas Fiskal, Percepatan Infrastruktur, dan Intermediasi Perbankan". Hotel Pullman, Jakarta, 19 Juni 2012.
120. "Transparansi Anggaran dalam Perspektif Kebijakan Publik", Musyawarah Nasional FITRA 2012 "Refleksi - Restrospeksi Kinerja FITRA dan Reformulasi Perencanaan Strategis". Hotel Aston Tropicana, Bandung, 14 Juni 2012.
121. "Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya OJK", Seminar "Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan". Ruang Multi Media Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 26 Mei 2012.
122. "Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran", Seminar Pencerdasan "Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan Ketatanegaraan". Aula Student Center FE UI, Depok, 14 Mei 2012.
123. "Apakah Desentralisasi Untuk Pemerataan", pada Konferensi Internasional "Alternative Visions for Decentralization in Indonesia". Paper sebagai tanggapan terhadap Paper Shah *et al.* (2011) dengan judul "General Purpose Central-provincial-local Transfers (DAU) in Indonesia: From Gap Filling to Ensuring Fair Access to Essential Public Services for All. Hotel Borobudur, Jakarta, 13 Maret 2012.
124. "Manifestasi Politik Menuju Kesejahteraan Rakyat", Diskusi Publik Badan Eksekutif Mahasiswa Batavia Raya "Kegaduhan Politik dan Penegakan Hukum dalam Kacamata Partai Koalisi". Gedung Juang 45, Jakarta, 27 Januari 2012.
125. "Penjabaran UU 33/2004 dalam Kerangka Otonomi Daerah". Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional "Reinventing Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah secara Berkelanjutan". Silae Swiss Bell Hotel, Palu, 16 – 19 Februari 2012.
126. "Akuntabilitas Penyusunan Anggaran". FGD The Indonesian Institute "Perumusan dan Pembahasan APBN di DPR: Studi Awal tentang Akses Publik ke Informasi". Jakarta, 18 Januari 2012.
127. "Integrated Budgeting System For Enhancing The Good Governance", International Seminar "The performance budgeting framework: Implementation of Performance Based Budgeting and MTEF revisited". Dharmawangsa Hotel, December 5th, 2011. Jakarta.
128. "Antisipasi Krisis Global dengan Ekonomi Kerakyatan", Seminar Koran Jakarta "Ekonomi Kerakyatan Solusi Menghadapi Krisis Global: Peran Perbankan pada Sektor Pertanian". Hotel Bidakara, Jakarta, 29 November 2011.
129. "Politik Anggaran dalam Merespons Perubahan UU Nomor 33 Tahun 2004" Konsultasi Publik "Politik Anggaran Kebijakan Dana Perimbangan". Hotel Alia Cikini, Jakarta, 29 November 2011.
130. "Urgensi Transparansi dalam Anggaran Negara", Kuliah Umum Forbi 2011 Ilmu Administrasi Negara FISIP UI "Transparansi: Jembatan Nasib Rakyat Menuju Kesejahteraan". Ruang Auditorium Gedung Komunikasi FISIP UI. Depok, 23 November 2011.

131. "Moda Transportasi Ideal dalam Percepatan MP3EI", Seminar Nasional Diseminasi Produk-Produk Perencanaan Kementerian PPN/Bappenas "Percepatan Implementasi MP3EI dalam Konteks Pembangunan Moda dan Sistem Transportasi Publik yang Ideal". Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 22 November 2011.
132. "Pembahasan Anggaran Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas", Seminar Nasional Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara "Proses Pembahasan Anggaran di Parlemen". Hotel Borobudur, Jakarta, 15 November 2011.
133. "Perekonomian Indonesia di Tengah Ancaman Krisis", Seminar Nasional "Dampak Ketidakpastian Ekonomi Global terhadap Perekonomian Indonesia". Hotel Nikko, Jakarta, 15 November 2011.
134. "Penyempurnaan Siklus APBN dalam Merespons Tantangan Pembangunan", Seminar Hari Keuangan "Menuju APBN yang Mensejahterakan Rakyat". Hotel Borobudur, Jakarta, 26 Oktober 2011.
135. "Governance Pada Perasuransian", Seminar Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia (ABAI), Hotel Novotel Bogor, 22 September 2011.
136. "Krisis Utang Amerika Serikat Dan Eropa Terhadap Perekonomian Nasional "Seminar Nasional Sabang-Marauke Circle,"Dampak Krisis Utang AS dan Eropa terhadap Perekonomian dan Pasar Finansial Indonesia". Hotel Le Meridien Jakarta, 19 September 2011.
137. "Peran DPR dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan", *Bank Wiser Roundtable*. Hotel Nikko Jakarta, 13 September 2011.
138. "Politik Anggaran dalam Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional", Seminar "Sustainabilitas Pembiayaan dalam Program Jaminan Sosial", Hotel Crowne Plaza, Jakarta, 18 Agustus 2011.
139. "Meretas Tantangan Kelembagaan Bank Indonesia", Program Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan 30 Tahun 2012 "Berbagai Dinamika dan Tantangan Kelembagaan yang Dihadapi Bank Indonesia". Bank Indonesia, Jakarta, 26 Juli 2012.
140. "Pengembangan Industri Perkapalan Nasional", Seminar Maritime Talk "*Quo Vadis* Industri Perkapalan Nasional", Auditorium Adhiyana, Wisma ANTARA, Jakarta, 23 Juni 2011.
141. "Peran DPR RI dalam Pencapaian MDGs 2015" Konferensi Internasional II Prakarsa "MDGs Financing for Indonesia: How will Indonesia Achieve it in 2015?", Hotel Santika Premiere, Jakarta, 15--16 Juni 2011.
142. "Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal", Seminar dan Dialog kebijakan "Hubungan Pusat dan Daerah dan Penataan Keuangan Daerah: Evaluasi Satu Dasawarsa Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal", UGM, Yogyakarta, 4 Juni 2011.
143. "Kedaulatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", Seminar Nasional dalam rangka RAKORNAS KAHMI, "Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Mewujudkan Keadilan Sosial". 28--29 Januari 2011, Jakarta.
144. "Pengendalian Inflasi Yang Lemah Miskinkan Rakyat", *Bisnis Indonesia*, 12 Januari 2011.
145. "Siapa Penanggung jawab Inflasi", *Sinar Harapan*, 6 Januari 2011.
146. "Kecemasan Harga BBM", *Suara Karya*, Januari 2011.
147. "Ekonomi Indonesia dan penjabaran daerah 2011", Seminar nasional Kantor Bank Indonesia Jambi, Jambi, 29 Desember 2010.
148. "Jalan Buntu RUU OJK", *Kontan*, Desember 2010.

149. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah," Naskah Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, 12 Desember 2010.
150. "FTZ Batam Bintang Karimun Menghadapi Tantangan Globalisasi", Orasi Ilmiah Wisuda STISIPOL Raja Haji ke 10 di Tanjung Pinang, 9 Desember 2010.
151. "Pengelolaan BPHTB dan PBB P2 di Daerah", Seminar Kemenkeu di Surabaya, 2 Desember 2010.
152. "Indonesia: Sebuah Negara kesejahteraan?" Makalah untuk Diskusi Kelompok Diskusi Tanjung Pinang, 12 November 2010.
153. "IPO PT KS", *Suara Karya*, November 2010.
154. "APBN 2011: Tafsir Kemakmuran Rakyat", *Kontan*, Oktober 2010.
155. "Nasionalisme Pemuda dan Masalah Ekonomi Bangsa", Seminar Universitas Muhammadiyah Malang, 27 September 2010
156. "Mencari Format Ideal OJK" Diskusi PSHP, Hotel Santika Jakarta, 26 Agustus 2010.
157. "Redenominasi Rupiah", *Suara Karya* Agustus 2010.
158. "RUU OJK, Orkestra Moneter dan Fiskal," *Kontan* 2 Agustus 2010.
159. "Format Ideal DPRD dalam Upaya mengakomodasi Penyelenggaraan Demokrasi dan Pemerintahan Daerah," Seminar Nasional ADEKSI, Hotel Kartika Chandra, 28 Juli 2010.
160. "Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara pada Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS), Makalah FGD Hotel Santika 20 Juli 2010.
161. "Mendorong Perbankan sebagai Katalisator Perekonomian Sulawesi Utara", Seminar Bank Sulut, Juli 2010.
162. "Dukungan Legislatif atas BPR, Ekonomi Rakyat dan UMKM", Seminar Jakarta 9 Juli 2010.
163. "APBN dan TDL", *Suara Karya*, Juli 2010.
164. "Implementasi Ekonomi Pancasila pada Era Globalisasi", makalah untuk diskusi *Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila di tengah Hantaman Ekonomi Global*, Megawati Institute, 30 Juni 2010.
165. "Dana Pembangunan Desa", *Suara Karya*, Juni 2010.
166. "Era Perdagangan Bebas Batam Bintang Karimun", Orasi Ilmiah Wisuda Mahasiswa/i STIE Ibnu Sina Batam, 19 Juni 2010.
167. "Politik Anggaran dan Mekanisme Pengawasannya", Makalah Rakornas Legislator Partai Golkar, 5 Juni 2010.
168. "Strategi Pendidikan", Makalah Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan se-Kepri 2010, Batam 3 Juni 2010.
169. "Penguatan Tugas dan Fungsi Pokok Pemerintah Daerah Dalam Penganggaran Keuangan Daerah," Workshop di Kab Purwakarta, 2 Juni 2010
170. "Telaah RUU OJK", Makalah Seminar Akbar Tanjung Institute, 1 Juni 2010
171. "Strategi Kebijakan Anggaran untuk Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan," Seminar di Manado, 24 Mei 2010.
172. "Untuk Siapa APBN-P 2010 dan APBD-P 2010", Inersia Jakarta, Mei 2010.
173. "Akhirnya, APBN-P 2010 disahkan", *Suara Karya*, Mei 2010.
174. "Peran Anggaran di Sektor Kesehatan dalam memerangi AIDS," makalah pada seminar *The Role of House Representative RI, in supporting HIV-AIDS Prevention Program*, Jakarta, 3 Mei 2010
175. "Kebijakan Transportasi Nasional, Berkelanjutan, Terpadu, Sektoral dan Wilayah", Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti, April 2010
176. "Untuk Siapa APBN-P 2010", *Kontan*, 19 April 2010.

177. "Untuk Siapa APBN-P 2010" Forum Diskusi Forkem, Bandung 10 April 2010.
178. "Arah Pembangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia," Workshop Universitas Brawijaya, 7 April 2010.
179. "Reformulasi Model Transfer Pusat ke Daerah dalam mendorong kinerja Daerah", seminar di Hotel Mercure Makassar, 6 April 2010.
180. "Governance dan Akuntabilitas Bank Indonesia", SESPIBI Bank Indonesia, 18 Maret 2010.
181. The Bridge of Batam, Bintan and Karimun to Singapore: FTZs and investment Opportunities" Paper for Roundtable 2010 on The Bridge between The Riau Archipelago and Singapore held by S Rajaratnam School of International Studies, A Graduate School of Nanyang Technological University, Singapore, 16 Maret 2010.
182. "Penguatan Tugas dan Fungsi Pokok Pemerintah Daerah Dalam Penganggaran Keuangan Daerah," Workshop *Pengelolaan Anggaran di Era Otonomi Daerah*, Malang, 8 Maret 2010.
183. "Stimulus atau Tambahan Belanja", *Suara Karya*, Januari 2010.
184. "Kasus Bank Century: Masalah Hukum atau Politik?" *Bisnis Indonesia* 23 November 2009.
185. "Budgeting Role on Disaster Risk Reduction and Climate Change" Seminar di Geneva, 20-21 November 2009.
186. "Program Kinerja Lima Tahun KIB II", *Suara Karya*, November 2009.
187. "Orasi Ilmiah: Kewirausahaan UMKM Mengatasi Krisis dan membangun Kesejahteraan Rakyat", Wisuda program Studi S1 dan Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kosgoro Tahun Akademik 2009/2010, 14 November 2009.
188. "Struktur, Proses APBN/APBD" makalah ppt diskusi di Hotel Mercure Ancor, 12 Oktober 2009.
189. "Audit Investigasi BPK atas Century", *Suara Karya*, Oktober 2009.
190. "DPR, Pemerintah dan RUU JPSK", *Suara Karya*, Oktober 2009.
191. "Target Perekonomian Tahun 2010", *Suara Karya*, September 2009.
192. "Postur APBN 2010" paper diskusi wartawan di Sukabumi, Agustus 2009.
193. "Nota Keuangan RAPBN 20120", *Suara Karya*, Agustus 2009.
194. "Pajak Progresif Kendaraan Bermotor", *Bisnis Indonesia*, Agustus 2009.
195. "Progress and Challenges in Financing DRR: Local Government Network on Disaster Risk Reduction," Seminar International diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 22-24 Juli 2009.
196. "Pertumbuhan Ekonomi RAPBN 2010' Harian Suara Karya Juni 2009.
197. "Progress and Challenges in Financing DRR: Second Session on Global Platform for Disaster Risk Reduction," diselenggarakan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Geneva, Switzerland, 16-19 Juni 2009.
198. "Politik Anggaran Capres 2009", Harian Suara Karya, Mei 2009.
199. "Policy Changes: Linking Disaster Risk Management and Poverty Reduction from Gender Perspective," Makalah untuk seminar "The International Conference on Gender and Risk Reduction diselenggarakan oleh The All-China Women Federation dan UNISDR, Beijing, China, 20-22 April 2009.
200. "RUU Jasa Konsultan," Seminar RUU Jasa Konsultan diselenggarakan oleh INKINDO, Batam, 31 Maret 2009.

201. "DPR RI dan Pembangunan Daerah Kepri," Makalah Diskusi Publik diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Islam Kepri, Hotel Comfort, Tanjung Pinang, 28 Maret 2009.
202. "Dukungan DPR RI Untuk Infrastruktur Daerah," Seminar diselenggarakan oleh Kantor Menko Perekonomian, Hotel Novotel, Batam, 24 Maret 2009.
203. "Peluang *Free Trade Zone* Batam Bintan Karimun," makalah Seminar Batam diselenggarakan oleh Bank Mandiri, Hotel Novotel, Batam, 23 Februari 2009.
204. "Dukungan DPR Mengatasi Krisis Global: FTZ BBK dalam Mengatasi Krisis Global," seminar Depkeu, Hotel Novotel, Batam, 10 Februari 2009.
205. "Analisis Perspektif Pembangunan Ekonomi Indonesia," Makalah untuk Pendidikan dan Latihan Jurkamda dan Rakorda Bappilu 2009 DPD Partai Golkar Kepri, Hotel Comfort, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 15 Desember 2008.
206. "Kemuliaan Ikhlas Berkorban," Khutbah Iedul Adha 1429H, Rusun BIDA Mukakuning, Batam, Kepulauan Riau, 8 Desember 2008
207. "Format Ideal Laporan BPK," Workshop Biro Anggaran DPR RI, Hotel Mulia, Jakarta, 5 Desember 2008.
208. "Respons APBN 2009 Terhadap Krisis Keuangan Global," Seminar Bank Indonesia, Batam, Kepulauan Riau, 28 November 2008.
209. "*Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction, The Role of Indonesian Parliament*," Makalah pada The 8th Annual Conference of Parliamentary Network on the World Bank, Paris, France, 22 November 2008.
210. *Indonesia's Local Tax and Public Charges*," Makalah pertemuan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), Bangkok, Thailand, 12-13 November 2008.

211. "APBN 2009 dan Antisipasi Krisis," *Suara Karya*, 4 November 2008.
212. "Perilaku Pemburu Rente dan Korupsi," Duaberita.com, 6 Oktober 2008.
213. "Nota Keuangan RAPBN 2009," *Suara Karya*, 19 Agustus 2008.
214. "*Priorities and Challenges in Budget Reform for Indonesia*," Notes for International Conference, World Bank, Grant Hyatt, Jakarta, 26 Mei 2008.
215. "Perlunya *Special Treatment* untuk Majukan Sektor Informal," dalam *Meluruskan Arah Reformasi* ed Musni Umar/Musfihin Dahlan, PT Infomediata, Jakarta, Mei 2008.
216. "Harga versus Subsidi BBM," *Suara Karya*, 7 Mei 2008.
217. "Defisit APBNP 2008," *Suara Karya*, 1 April 2008.
218. "Calon Gubernur Bank Indonesia," *Suara Karya*, 19 Februari 2008.
219. "Bank BUMN, UMKM dan Kredit Macet," *Suara Karya*, 12 Desember 2007.
220. "Perubahan APBN 2008," *Suara Karya*, 12 Februari 2008.
221. "ATBI 2008 dan APBN 2008," *Suara Karya*, 29 November 2007.
222. "Dividen BUMN pada 2008," *Suara Karya*, 23 Oktober 2007.
223. "Harga Minyak dan Defisit APBNP 2007," *Suara Karya*, 24 September 2007.
224. "Nota Keuangan Presiden," *Suara Karya*, 18 Agustus 2007.
225. "Perencanaan dan Realisasi APBN," *Suara Karya*, 26 Juli 2007.
226. "RUU Penilaian: Mengapa tidak?" Makalah Seminar Penilaian: Arti Penting Penguatan Institusi Penilaian dan

- Penyusunan RUU Penilaian Indonesia, Realitas Masa Kini dan Tantangan Masa Depan, Program MAPE FE UGM, Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, 9 Juni 2007.
227. "APBD dan Pengawasan" Diskusi Anggota DPRD, Hotel Elmi, Surabaya, 26 April 2007.
228. "Bush dan SBY", Majalah Slipi DPP Partai Golkar, Desember 2006.
229. "Instrumen Fiskal Bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup," FDG INDEF -Deputi Menteri KLH, Kantor KLH, Jakarta, 20 Desember 2006.
230. "*Notes on Effective Supervision of Financial Services in Indonesia*," International Seminar, FEUI- BI, Hotel Nikko, Jakarta, 13 Desember 2006.
231. "Catatan DPR ttg RUU Perbankan Syariah," Seminar Universitas Trisakti, Jakarta, 17 Oktober 2006
232. "Ekonomi Indonesia 2007" Ceramah Umum STISIPOL, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 9 September 2006.
233. "Kebijakan Ekonomi Partai," Rakorda DPD Partai Golkar Kepri, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 8 September 2006.
234. "Pergerakan Pemuda," TOT, LPM-PKK Kepri, Asrama Haji Batam, 26 Agustus 2006
235. "Otoritas Jasa Keuangan Yang Bagaimana?" Seminar "Quo Vadis Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", InfoBank Hotel Nikko Jakarta, 19 Juli 2006.
236. "Perbankan Sehat," Sekolah Staf Pimpinan BI, Bank Indonesia, Jakarta, 5 Juli 2006.
237. "*Inflation Targeting Framework Bak Indonesia*," diskusi BI, Jakarta, 28 Juni 2006.
238. "Pembahasan RUU Perbankan Syariah," BPHN, Hotel Grand Candi Semarang, 6 Juni 2006.
239. "Legislatif-Eksekutif Lembaga Mahasiswa," Mahasiswa Universitas Tarumanegara, Cibodas, 6 Mei 2006.
240. "Catatan Kebijakan Moneter dan Fiskal," Seminar FE Universitas Brawijaya Malang, 8 April 06.
241. "Catatan Harry Azhar Azis untuk Menkeu RI," Raker Komisi XI DPR RI, Jakarta, 6 Februari 2006.
242. "Pendidikan Orang Dewasa (Andragogi)," Pelatihan DPD Partai Golkar Kepri, Batam, 2 Oktober 2005.
243. "Dukungan Dana Agroindustri," Lokakarya LPPI, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 26 September 2005.
244. "Pointers on USAID's Economics Growth Retreat," USAID, Hotel Hyatt, Bandung, 14-16 September 2005.
245. "Kebijakan Ekonomi," DPRD Morowali, Universitas Tadulako – Australia Legal Research Institute, Palu, 28 Agustus 2005.
246. "Pengambilan Keputusan," Acara Training for Trainers, DPD Partai Golkar Bangka Belitung, Pangkal Pinang, 27 Agustus 2005.
247. "Keorganisasian-Kepemimpinan," Latihan Instruktur Tingkat Pusat, DPP Partai Golkar, Slipi, 12 Juli 2005.
248. "Korupsi, Pembangunan dan Kesra," BEM FE Universitas Trunojoyo, Madura, 6 Juni 2005.
249. "UMKM/Perbankan", Seminar Bank/UMKM, BEM Universitas Airlangga, Surabaya, 17 Maret 2005.
250. "Mengapa Pilih Mega-Hasyim," Visi-Misi Koalisi Kebangsaan, September 2004.
251. "Korupsi dan Pembangunan", *Korupsi Musuh Bersama*, Musni Umar /Syukri Ilyas (Eds), LPK, Jakarta, Agustus 2004.
252. "Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah," Semiloka Persatuan Wredatama RI Unit Depdagri, Hotel Aryaduta, Jakarta, 29 Juli 2004.
253. Pembicara Tim Ekonomi Capres Wiranto-Wahid, diskusi "Visi Capres Kebijakan Ekon/Persaingan Usaha," KPPU, Hotel Borobudur, Jakarta, 7 Juni 2004

254. Pembicara Tim Ekonomi Capres Wiranto-Wahid, diskusi "Pemerintah dan ketergantungan utang," Radio 68H, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 3 Juni 2004.
255. "Kewirausahaan," Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan PMD, Kabupaten Bekasi, Kantor Subdin Koperasi/ PKM Bekasi, 1 Juni 2004.
256. "Kampanye Politik" Orientasi Juru Kampanye Pusat, DPP Partai Golkar, Hotel Horizon, Jakarta, 26 Januari 2004.
257. "Kebijakan Ekonomi Fiskal Era Krisis," Konperensi Forum Komunikasi Dosen Se-Indonesia, Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, 10--11 Desember 2003.
258. "Big Bang Otonomi Daerah," seminar UU Otda, Evaluasi Konsepsi dan Aplikasi, DPP Partai Golkar, Htl Bidakara, Jakarta, 30 Oktober 2003.
259. "Kebijakan Ekonomi Kelautan," Seminar PKSPL-IPB-Intrans, Departemen Dalam Negeri dan Program Pascasarjana IPB, Bidakara, Jakarta, 7--8 Oktober 2003.
260. "Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," Calon Anggota Komisi Konstitusi pada Sidang PAH I MPR RI, September 2003.
261. "Kebijakan Subsidi BBM untuk Siapa?" Majalah MADANI Vol 4/No 6/03.
262. "Dampak SARS terhadap Perekonomian," Seminar *Severely Acute Respiratory Syndrome* (SARS), KAHMI, Hotel Wisata, Jakarta, 25 Juni 2003.
263. "BBM dan Kesejahteraan Rakyat," Dialog Pengurus Nasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial, Gedung Pemuda DPP KNPI, Jakarta, 17 Juni 2003.
264. "Competitiveness dan Good Governance Perusahaan Daerah di Era Otonomi," seminar Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 12 April 2003.
265. "Peluang Dagang Indonesia-China," Seminar Indonesian Managers Club (IMC), Hotel Cempaka, Jakarta, 27 April 2002.
266. "Impak Divestasi BCA atas Industri Perbankan di Indonesia," diskusi Himpunan Mahasiswa Akuntansi STEI, Jakarta, 27 April 2002.
267. "Recovery Ekonomi Indonesia," Seminar PBHPMIG, Hotel Wisata, 13 April 2002.
268. "Peran BPPN dalam Pemulihan Ekonomi," BEM FATETA IPB, Bogor, 5 April 2002.
269. "Ekon Indonesia 2002: Harap-Cemas," Seminar Kampus Kuning, Jakarta, 9 Feb 2002.
270. "Reformasi Politik Pembangunan," Tanwir Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, 20 Oktober 2001.
271. "Evaluasi Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001," Staf Ahli FPG MPR, Agustus 2001.
272. "Reformasi Kebijakan Pembangunan," Forum Propinsi Baru, Ternate, 4 September 2001.
273. "AFTA and Management Challenges of Petroleum Industry," Konperensi Internasional, MPE 2001, JHCC, Jakarta, 21--23 Agustus 2001.
274. "Reformasi Kebijakan Ekonomi," Forum Indonesia untuk Propinsi Baru dan Partnership for Governance Reform, Gorontalo, 28--30 Juli 2001.
275. "Karya Ilmiah Jurnal," Lokakarya Penulisan Ilmiah STEI, Jakarta, 17 Juli 2001.
276. "Reformasi Politik Pembangunan," Seminar PUSWIK-Universitas Indonesia, Jakarta, 5 Juni 2001.
277. "Kebijakan Pajak untuk Kesejahteraan," Seminar FIA Universitas Brawijaya, Malang, 2 Juni 2001.
278. "Ideologi Nasional Kebijakan Ekon," Seminar SAPMA PP, Jakarta, 1 Juni 2001.
279. "Kepemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA," Badan Pekerja MPR RI, Jakarta, 17 April 2001.
280. "Kewirausahaan dalam Era Globalisasi," Pidato Ilmiah, APP, Jakarta, 27 Februari 2001.

281. "Strategi Kompetisi dalam Pasar Tenaga Kerja di Era Globalisasi," makalah Pidato Ilmiah, STIMA KOSGORO, Jakarta, 10 Februari 2001.
282. "Money Laundering dan Bank Komersial," Forum Kampus Kuning, Jakarta, 26 Januari 2001.
283. "Moral-Strategi Kebijakan Ekon Era Otda," DPPPG, Hotel Sahid, Surakarta, 16 Desember 2000
284. "2001: Krisis Baru?" Majalah Tajuk No 21/Th III, 14 Desember 2000.
285. "Ekonomi Politik Usaha Kecil dan Menengah," Seminar UKM, Jakarta, 10 November 2000
286. "Moral Kebijakan Ekonomi Gusdur," Tajuk No 18, 26 Oktober-6 November 2000.
287. "Bisnis UKM" seminar UKM, Univ Mercu Buana, Jakarta, 25 September 2000.
288. Restrukturisasi Industri Indonesia," DPA RI, Jakarta, 21 September 2000.
289. "Mengatasi Krisis: *Back to Basic*," Rakernas GM Mathla'ul Anwar, Jakarta, 7 September 2000.
290. "Structural Change in Import Demand for Textiles from Developing Countries," Ph.D. Dissertation, Oklahoma State University, USA, 2000.
291. "Lesson from the Crisis," Seminar, Clausen Center, PERMIAS, and UC Berkeley, Univ of Calif, Berkeley, March 27, 1999.
292. "The Economies of Southeast Asia: The Growth and Development of ASEAN Economies," Journal of Asian Business, Michigan, 1999.
293. "Catatan RUU Politik," Seminar Oklahoma St Univ, Permias, USA, 26 September 1998.
294. "Riba dan Ketidakadilan Ekonomi," Seminar mahasiswa, Oklahoma State University, Stillwater, Amerika Serikat, 1998.
295. "Asia-Pacific Economies: A Survey," Journal of Asian Business, Michigan, Amerika Serikat, 1997.
296. "Asian Market Economies: Challenges of Changing International Environment," Journal of Asian Business, Michigan, Amerika Serikat, 1995.
297. "World Market Demand for Indonesian Coffee," Seminar Oklahoma State University, Amerika Serikat, 1994.
298. "The Impact of Change in Agricultural Export Prices on Household Income," Seminar Oklahoma State University, Stillwater, Amerika Serikat, 1994.
299. "A Review on International Textiles and Apparel Agreements and Their Effects on Developing Countries," Seminar Oklahoma State University, Stillwater, Amerika Serikat, 1994.
300. "Menyongsong Masa Depan, Analisis Keberadaan dan Aktivitas KNPI 1973-1992," kontributor buku, Yayasan Piranti Ilmu, 1993.
301. "The Political Economy of Development in Independent Indonesia," MA Thesis, University of Oregon, Eugene-USA, 1990.
302. "The Effects of Foreign Economic Aid on the Development of Indonesia," Seminar University of Oregon, Eugene, Amerika Serikat, 1990.